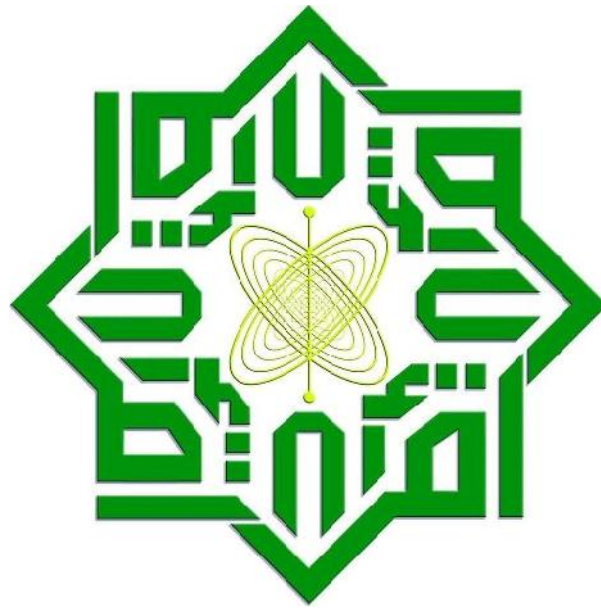


**STUDI PELAKSANAAN ZAKAT PADI DI PADANG TENGAH KELANTAN  
MALAYSIA DITINJAU MENURUT ISLAM**

**Jurnal**



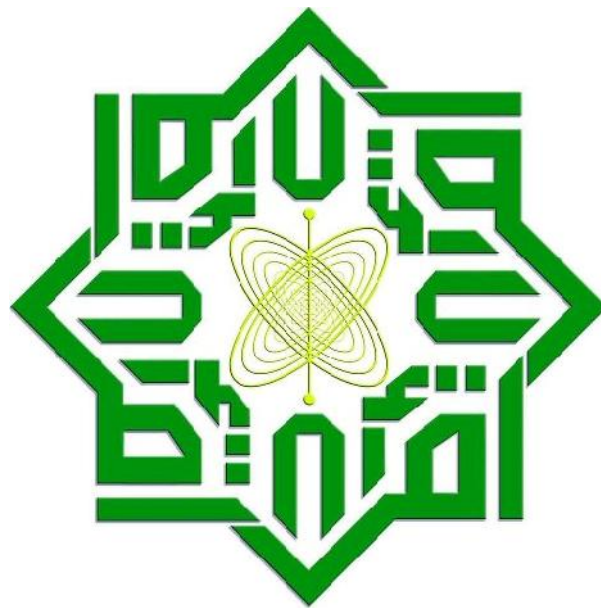
**MOHD IZANI BIN ABDULLAH**  
**NIM. 10921008915**

**Dosen Pembimbing Mawardi S. Ag. M.si.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**BATASAN AURAT DAN PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG  
KECIL MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDARAYA ISLAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Jurnal**



**SOLAHUDIN BIN MAMAT**  
**NIM. 10921008928**

**Dosen Pembimbing Muhammad NurWahid M.Ag**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

## DAFTAR ISI

Hal

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Permasalahan .....	9
C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
D.Metode Penelitian .....	10
E. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM</b>	
A.Asal Usul Negeri Kelantan .....	13
1. Sejarah Negeri Kelantan .....	14
2. Penduduk d .....	19
3. Iklim .....	19
4. Kerajaan.....	19
5. Ekonomi .....	20
6. Budaya .....	20
7. Pendidikan .....	21
B.MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDARAYA ISLAM	
1.Sejarah Berdiri .....	22
2.MPKB-BRI .....	23
3.Visi dan Misi .....	24
4.Pentadbiran MPKB .....	25
5.Ekonomi .....	26
6.Pendidikan .....	27
7.Keagamaan .....	28
8.Kemasyarakatan .....	30
9.Kebudayaan .....	32

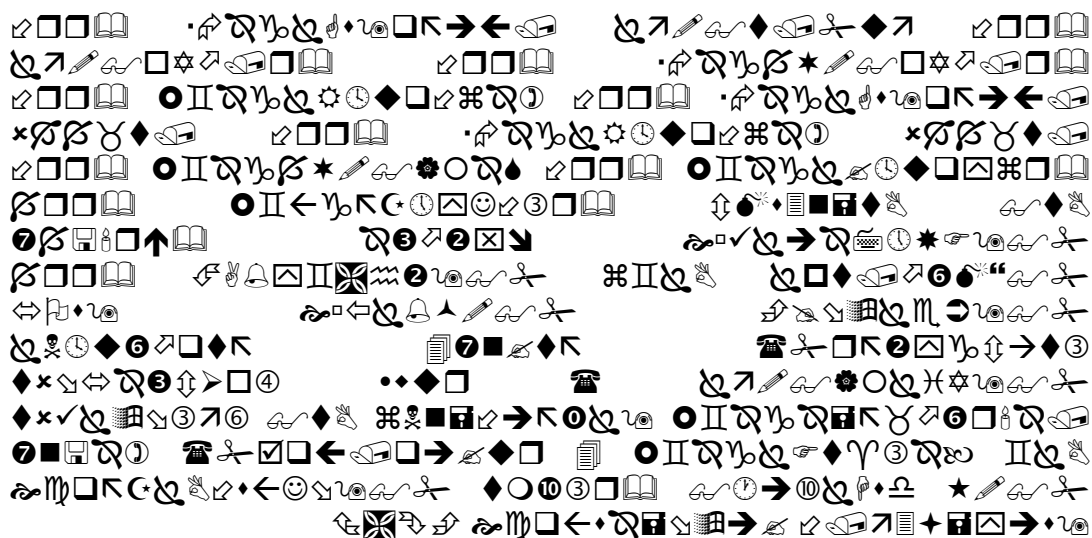
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU-BRI DAN PENGUATKUASAAN AURAT	
	A.Lahirnya Undang-Undang Kecil .....	34
	1. Undang-undang Kecil Akta (27 A) .....	34
	2.Kompaun/Denda .....	35
	3.Arahan menutup Aurat .....	36
	B. Isi Undang-Undang Kecil .....	38
BAB IV	AURAT DALAM UNDANG-UNDANG KECIL MPKB-BRI DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Batasan Aurat terdapat Dalam Undang-Undang MPKB-BRI	41
	B. Pelaksanaannya dan Sangsi Bagi Yang Melanggar Ketentuan Tersebut .....	49
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu-BRI tentang Aurat .....	52
BAB V	PENUTUP	
	A.Kesimpulan .....	64
	B.Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA

SOAL SELIDIK

LAMPIRAN

## PENDAHULUAN

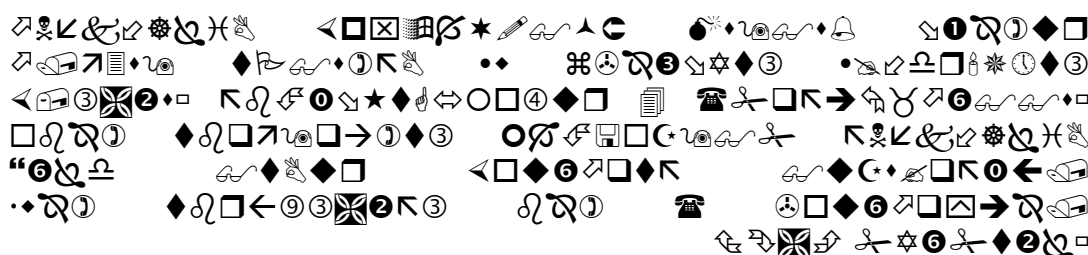


Artinya: Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada orang-orang laki-laki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya Dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang laki-laki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang laki-laki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Wahai orang-orang Yang beriman, supaya kamu berjaya”.(Al-Nuur:30-31)

Berdasarkan petunjuk surat al-Nuur:30-31 di atas, Allah memerintahkan kepada kaum mukminin agar memelihara pandangan mata dan kemaluan mereka. Kemudian Allah menyatakan bahwa perbuatan orang-orang yang memelihara pandangan dan kemaluannya dari maksiat dan menyucikan mereka. Dua poin yang dapat diambil dari teks di atas yaitu: Pertama, konsep *ghadhdh al-bashar*

menundukkan pandangan dan *hifzh al-furuj* menjaga atau menutupi organ genital merupakan sesuatu yang sentral dalam kode tersebut. Kedua, laki-laki disebut terlebih dahulu agar mematuhi perintah-perintah ini yaitu mengendalikan tatapan mereka pada wanita dan menekan hasrat mereka pada saat berinteraksi dengan wanita yang bukan muhrimnya. Selanjutnya dalam teks tersebut juga memerintahkan hal yang sama pada wanita untuk menundukkan pandangan mereka.

*Aurat* berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu jika dipandang. Dalam al-Qur'an lafaz aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal *mufrad* dan dua kali dalam bentuk plural *jama'*. Bentuk tunggal disebut dalam surah QS.al-Ahzab 13:<sup>2</sup>



Artinya : “dan juga masa itu ialah masa segolongan di antara mereka berkata: "Wahai penduduk Yathrib, tempat ini bukan tempat bagi kamu (untuk berjuang di sini), oleh itu balikhlah". dan sebahagian dari mereka pula meminta izin kepada Nabi (hendak balik) sambil berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah Kami memerlukan perlindungan", pada hal ia tidak memerlukan perlindungan, mereka hanya bertujuan hendak melarikan diri (dari berjuang menegakkan Islam)".(Al-Ahzab:13)

Kata ‘aurat’ dalam surah al-Ahzab ayat 13 diartikan oleh mayoritas ulama’ tafsir dengan celah terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam surah an-Nur 31 dan 58 diartikan sebagai sesuatu tubuh yang membuat malu jika dipandang, atau dipandang buruk

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 1101

untuk diperlihatkan. Untuk itu syariat Islam mewajibkan perempuan agar menutup aurat (al-sitr) dan melarang tabarruj atau memperlihatkan perhiasan didepan laki-laki yang bukan muhrim. Sebagaimana menutup aurat merupakan kewajiban yang dikhususkan bagi perempuan, maka juga dijadikan perilaku menundukan pandangan sebagai tanggung jawab kolektif diantara perempuan dan laki-laki. Namun tanggung jawab laki-laki dalam menutup aurat lebih kecil daripada tanggung jawab perempuan. Sementara itu tanggung jawab laki-laki dalam menundukkan pandangan lebih besar daripada tanggung jawab perempuan.

Dalam fiqh perbahasan mengenai aurat<sup>3</sup> didasarkan pada wacana tubuh dengan berbagai dimensi sensualnya. Fiqh menganggap ada beberapa anggota tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Pada awalnya inilah definisi tentang aurat. Orang menyebut aurat untuk hal-hal yang tidak pantas untuk diperlihatkan, tidak layak bahkan memalukan. Kemudian sesuatu yang memalukan itu justru bisa membangkitkan ghairah orang lain yang melihatnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Memalukan dan mengghairahkan yaitu sesuatu yang kontekstual, karena itu fiqh membedakan antara aurat laki-laki dan perempuan.

Dari dua kata kunci tentang aurat, yaitu ‘memalukan’ dan ‘mengghairahkan’, fiqh membangun wacana tentang tubuh dan norma-norma yang terkait dengannya. Dalam disiplin ilmu fiqih lafaz aurat diartikan sebagai yang memiliki muatan arti dalam surat al-Nur ayat 31 dan 58 yaitu berarti sebagian anggota tubuh manusia yang didalam pandangan umum buruk atau malu bila

---

<sup>3</sup> Marwan Ibrahim al-Kaysi, *Adab Sopan Dan Budi Pekerti Dalam Islam: Panduan Adab Islam*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 1997), h. 57



diperlihatkan dan bila dibiarkan terbuka mungkin bisa menimbulkan fitnah seksual. Oleh karena itu, kesepakatan para ulama' fiqih menyatakan bahwa harus ditutup dari pandangan orang dengan pakaian yang tidak tembus pandang dan tidak membentuk lekukan tubuh. Mengenai batas anggota tubuh yang dianggap aurat, pandangan fiqih membedakan antara perempuan dan laki-laki. Untuk aurat laki-laki walaupun ada perbedaan, tetapi secara umum mayoritas ulama' berpendapat bahwa laki-laki seharusnya menutup anggota tubuh antara pusar dan kedua lutut kaki. Sementara aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.

Terkait dengan pelaksanaan hukum Islam dalam hal kewajiban menutup aurat, Kelantan merupakan salah satu bagian negeri di Malaysia yang menerapkan hal ini. Hal ini didukung oleh komitmen PAS yang berhasil memegang tampuk kekuasaan di negeri ini. Sebagai negeri yang telah berjuang untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia, Kelantan telah mencoba membuat sendiri sebagai model yang menerapkan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat nyata dalam salah satu aturan yang dibuat yakni *Enekmen Qanun Jenayah Syar'iyah Nomor 2 Tahun 1985* yang disahkan pada 26 Maret 1985 yang merupakan penyatuan dari seluruh undang-undang yang berkenaan dengan kesalahan jinayah dan berlaku di negeri Kelantan. Enekmen ini memuat 2 bagian dan 34 seksyen. Bagian pertama merupakan bagian permulaan yang mengatur ringkasan, penafsiran, pemakaian dan pengecualian prerogratif.<sup>4</sup>

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK), Urusetia

---

<sup>4</sup>. Pusat Kajian Strategik, *Dasar-dasar Utama Kerajaan Negeri Kelantan* (Kota Bharu :Pustarak Enterprise, 2005), h.3

Pembangunan Wanita, Keluarga & Kesihatan (UPWKK) & Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), telah menganjurkan satu seminar yaitu ***‘Seminar Etika Pakaian 2010’*** pada tanggal 27 Rabiulakhir 1431 H bersamaan 12 April 2010 bertempat di Dewan Teratai, Kompleks Kota Darulnaim, Kota Bharu, Kelantan Darulnaim. Dalam kertas kerja Seminar Etika Pakaian 2010 tersebut sebanyak tiga kertas kerja telah dibentangkan yaitu pembentangan kertas kerja *pertama* oleh yang berbahagia Ustaz Azhar Bin Abdullah, yaitu pensyarah KIAS dengan tajuk ***‘Etika Pakaian Dan Batasan Aurat Menurut Perspektif Islam’***. Kertas kerja ini membincangkan dua isu menurut pandangan fiqh. **Pertama:** menyentuh konsep pakaian secara umum. **Kedua:** membincangkan perihal aurat sebagai lanjutan dari perbincangan konsep pakaian. Perbahasan aurat memfokuskan isu-isu aurat ketika keluar yang diperkaitkan dengan hak-hak awam.

Dalam kertas kerja tersebut yang berbahagia Ustaz Azhar<sup>5</sup> menyatakan masih ramai umat Islam terkeliru tentang etika pakaian Islam secara tepat. Akibatnya banyak orang memandang remeh dan bermudah-mudah dengan agama dalam soal berpakaian walaupun pakaian yang dipakai terlalu sempit dan dikira bersopan karena terpengaruh dengan adat atau bertudung sahaja dikira sudah mencukupi dan sudah menutup aurat walaupun berbaju sempit. Salah faham ini mesti diperbetulkan bukan sahaja melalui pendedahan-pendedahan ilmu yang komprehensif, malah menerusi penguatkuasaan undang-undang yang jitu.

Kertas kerja *kedua* dibentangkan oleh Dr. Yaacob Bin Yusof, yaitu pendaftar KIAS, dengan tajuk ***‘Etika pakaian Non-Muslim’***. Kertas kerja ini membincangkan satu perspektif terhadap bagaimanakah rasionalnya pakaian mereka yang bukan

---

<sup>5</sup> Ustaz Azhar Abdullah (Pensyarah KIAS), Wawancara, tanggal 10/ 11/ 2011.

Islam dalam konteks masyarakat berbagai bangsa dan agama (*multiracial*) Malaysia. Ia bukan satu sorotan khusus tentang budaya masyarakat tertentu seperti China dan India misalnya, tetapi lebih berupa analisis falsafah untuk tujuan berkenaan. Penyelidikan ringkas mengenai isu ini sebelum kertas ini ditulis, menampakkan agama-agama bukan Islam tidak mempunyai satu bentuk ukuran etika terhadap pakaian.

Dalam kertas kerja ini, mengatakan bahwa Islam yang bersifat universal untuk semua jenis budaya dan bangsa manusia, maka agama itu tidak menetapkan satu bentuk fesyen yang khusus mengenai pakaian.<sup>6</sup>

Kertas kerja ketiga ialah kertas kerja yang bertajuk ‘Pelaksanaan Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam’. Dalam kertas kerja ini, dibentangkan tentang akta berikut yaitu:-

#### *1-Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)*

MPKB-BRI adalah Pihak Berkuasa Melesen bagi semua premis perniagaan dalam kawasannya sebagaimana peruntukan Seksyen 107. Seksyen 102 memperuntukkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh membuat undang-undang kecil<sup>7</sup> untuk memelihara kesihatan, keselamatan dan kesentosaan penduduk atau mengadakan aturan dan pengelolaan yang baik dalam kawasannya bagi perkara berikut:

- a) Mengawal dan menyelia perjanjian suatu perusahaan, perniagaan atau perindustrian.
- b) Kuasa *mengkompoun* (denda).

---

<sup>6</sup> Seminar Etika Pakaian 2010’ pada tanggal 27 Rabiulakhir 1431 H bersamaan 12 April 2010 bertempat di Dewan Teratai, Kompleks Kota Darulnaim, Kota Bharu,

<sup>7</sup> Buletin MPKBRI Julai, 2011- Unit Penerbitan Dan Perhubungan Negeri Kelantan.

## *2-Undang-undang kecil MPKB-BRI*

1. UUK Tred, Perniagaan dan perindustrian MPKB (Pindaan) 2002
2. UUK Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MPKB (Pindaan) 2003 UUK Penjaja MPKB (Pindaan) 2003
3. UUK Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MPKB (Pindaan) 2003 dan banyak lagi.

Bagian kedua<sup>8</sup> memuat berbagai perkara kesalahan yang dapat dituntut enekmen ini yaitu etika pakaian dan batasan aurat menurut perspektif Islam, etika pakaian non-muslim, undang-undang aurat dan pemakaian sopan (menutup aurat), perbuatan dan perkataan tidak sopan, pondan (peria menyamai wanita), menghasut perceraian, khalwat, zina atau bersyubhat melakukan zina, liwath, musahaqah, hamil luar nikah, melarikan istri orang, melacurkan istri atau anak atau diri sendiri, menjual atau memberikan anak, menjadi mucikari, menggalakkan perbuatan maksiat, menyatakan orang lain kafir, minum yang memabukkan, makan di bulan Ramadhan, menghina undang-undang, bersyubhat, ingkar perintah mahkamah atau sultan, dan lainnya. Salah satu nuansa Islam yang kental di Kelantan ditunjukkan dengan papan iklan dan buletin yang ada di kota ini dengan melibatkan wanita dengan pakaian yang menutup aurat.

Walaubagaimanapun kajian ini akan lebih ditumpukan kepada bagian aurat dan Implementasinya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan ini dengan Judul:

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h.7

## BATASAN AURAT DAN PELAKSANAANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU BANDARAYA ISLAM

### **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan difokuskan pada skop batasan aurat dan perbahasannya menurut undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam (MPKB-BRI)

### **C. Permasalahan**

Dalam penelitian ini pokok masalah yang akan dibincangkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kecil MPKB-BRI tentang aurat?
2. Bagaimana pelaksanaannya dan sangsi bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang kecil MPKB-BRI tentang aurat?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kecil MPKB-BRI tentang Aurat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan sanksi bagi yang melanggar undang-undang tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan dan sanksi bagi yang melanggar undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam (MPKB-BRI).

**Antara Kegunaan Penelitian ini antara lain:**

1. Untuk mengetahui isi dari undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu, Bandaraya Islam (MPKB-BRI) secara rinci dan mendalam.
2. Sebagai bahan perpustakaan bagi penelitian lebih lanjut dimasa depan.
3. Sebagai syarat dalam penyelesaian studi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**E. Metode Penelitian**

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negeri Kelantan khususnya Kota Bharu yang merupakan pusat pemerintahan negeri bagian Kelantan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu karyawan MPKB-BRI (kaktangan awam), karyawan swasta (bukan kakitangan), pengusaha dan lain-lain dan objek kajiannya yaitu batasan aurat dan pelaksanaan undang-undang kecil MPKB-BRI terhadap arahan menutup aurat di negeri bagian Kelantan.

3. Sumber data

Sumber data primer dalam kajian ini adalah Undang-Undang Kecil MPKB BRI negeri Kelantan.

Adapun data sekunder yaitu hasil wawancara, penelitian dari buku-buku ilmiah, makalah-makalah dan lain-lain sumber kepustakaan

#### 4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan wanita MPKB BRI (kakitangan awam), karyawan wanita di sektor swasta (kakitangan bukan awam) serta wanita yang mengusahakan premis-premis (samaada dalam pembuatan makanan, perhiasan atau lain-lain) atau toko-toko jualan yang ada di Kota Bharu, Kelantan. Penulis mengambil sampel sebesar 50 orang dengan teknik random sampling.

#### 5. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan yaitu:

- a. Kaedah deduktif yaitu proses berfikir dengan mengemukakan pembahasan yang bersifat umum kemudian dibahas dengan permasalahan yang bersifat khusus.
- b. Kaedah induktif yaitu menunjukkan suatu proses berfikir dengan mengemukakan permasalahan yang bersifat khusus kemudian dibahas dengan pola berfikir yang bersifat umum.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi : pengamatan langsung pengkaji di lapangan terhadap kes yang terjadi terkait persoalan kajian ini di beberapa tempat umum seperti di kantor, toko-toko dan pasar yang berada di sekitar bandar Kota Bharu.
- b. Angket, yaitu sebaran borang yang berisi pertanyaan yang terkait dengan persoalan kajian ini.
- c. Wawancara atau temubual yaitu terhadap orang awam yang dipilih secara langsung.

#### 7. Metode Penulisan

Kajian ini ditulis dengan menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu dengan menghuraikan hasil kajian secara naratif untuk memperoleh gambaran sebenar tentang kes yang berlaku.

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Bab pertama** yang merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Batasan Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab kedua** yaitu uraian tentang wilayah penelitian yang menjelaskan secara umum tentang negeri bagian Kelantan, Malaysia. Asal usul Negri Kelantan dan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam.

**Bab ketiga** ialah tinjauan umum tentang undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu-BRI, latar belakang lahir undang-undang kecil.



**Bab keempat** ialah kajian tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kecil MPKB-BRI tentang aurat, Pelaksanaan dan sangsi bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut juga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang kecil MPKB-BRI.

**Bab kelima** pula ialah penutup yang mensimpulkan hasil kajian dan juga saran-saran bersesuaian dengan masalah kajian yang penulis utarakan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM

#### A. Asal Usul Negeri Kelantan.

Nama “Kelantan” dikatakan berasal daripada perkataan “gelam hitam”, yaitu nama Melayu bagi pokok *Melaleuca leucadendron*. Ada juga yang mengatakan bahawa nama itu berpunca daripada perkataan “kilatan” atau “kolam tanah”. Selain itu negeri Kelantan juga dikenali dengan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga, Tanjung Pura, Negeri Cik Siti Wan Kembang dan Serambi Mekah.<sup>1</sup>

Kelantan mempunyai keluasan 15,104.62 km<sup>2</sup> dan terletak di Timur Laut Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan, serta bersempadan dengan Thailand. Ibu negeri dan Bandar Diraja terletak di Kota Bharu.

Kelantan mempunyai 14 kawasan Parlimen, 45 kawasan Dewan Undangan Negeri dan terbahagi kepada 11 Jajahan iaitu Jajahan Kota Bharu (كوتا بهارو), Jajahan Pasir Mas (فاسير مس), Jajahan Tumpat (تومبات), Pasir Puteh (فاسير فوتينه), Jajahan Bachok (باجوك), Jajahan Kuala Krai (كوالا كراي), Jajahan Machang (ماچانج), Jajahan Tanah Merah (تانه ميره), Jajahan Jeli (جلي), Jajahan Gua Musang (غوا موسانج), Jajahan Kecil Lojing.

Bandar-bandar utama di negeri Kelantan termasuklah Kota Bharu (ibu negeri), Pasir Puteh, Pasir Mas, Tanah Merah, Kuala Krai, Jeli, Rantau Panjang dan Pangkalan Chepa.

---

<sup>1</sup> Buku Malaysia, *Buku Rasmi Tahunan: Jabatan Penerangan Malaysia*, (Kuala Lumpur, Unit Penerbitan 2009), h.41.

Warna bendera Kelantan ialah merah dan putih. Warna merah melambangkan kesetiaan rakyat kepada negeri dan warna putih pula melambangkan kesucian Raja. Kelantan menawarkan destinasi pelancongan yang menarik seperti Pantai Cahaya Bulan, Pantai Irama, Pantai Bisikan Bayu, Pantai Seri Tujuh, Pusat Batik/Songket, Kilang Batik, Bazar Buluh Kubu, Perkampungan Nelayan, Perkampungan Kraf tangan dan Muzium Kraf, Muzium Islam, Istana Balai Besar, Istana Jahar, Jeram Lenang, Jeram Pasu, kraf tangan perak Kelantan, Lata Beringin, Muzium Diraja, Muzium Negeri, dan Muzium Perang.<sup>2</sup>

Selain itu, Kelantan juga menawarkan pengalaman tinggal di kampung, menyusuri sungai, menikmati makanan yang enak-enak seperti kuih akok, lompat tikam, nasi kerabu, keropok dan sebagainya.

## **1. Sejarah Negeri Kelantan**

Negeri Kelantan<sup>3</sup> yang mempunyai seni budaya tradisional yang unik ini juga mempunyai sejarah persinggahsanaan yang menarik. Dirikan dalam tahun 1411M (814H) di Kelantan, terdapat seorang Raja yang beragama Islam bernama Raja Kumar. Tetapi sehingga kini ahli-ahli sejarah masih belum dapat mengesani daripada manakah asalnya Raja Kumar ini. Walau bagaimanapun baginda Raja Kumar telah menjalin hubungan muhibbah dengan Maharaja China, dan sebaliknya dalam tahun 1412M, baginda Raja Kumar telah menerima persembahan balas berupa kain-kain sutera dan surat kepujian daripada Maharaja China itu.

Selepas pemerintahan Raja Kumar lahir pula pemerintahan Sultan Iskandar sehingga 1465M. Kemudian Kelantan diperintah pula oleh Putera Baginda Sultan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.45

<sup>3</sup> Saad Shukri, *Detik-Detik Sejarah Kelantan*, (Kota Bharu:Pustaka Seri Aman, 1972 ), h. 43.

Mansur. Dalam zaman pemerintahan Sultan Mansur, nama Kelantan telah menjadi masyhur sehingga ke negeri Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Pada 1477M, Sultan Melaka ini telah menghantar bala tenteranya untuk menyerang Kelantan. Walau bagaimanapun ia berakhir dengan satu simpulan peristiwa yang menarik, iaitu baginda Sultan Mahmud Shah telah berkawin dengan Puteri Sultan Mansur yang bernama Onang Kening, yang kemudian menjadi bonda kepada Raja Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah (1528M).

Apabila Sultan Mansur Shah mangkat 1526M (928H), maka putera baginda, Raja Gombak ditabalkan menjadi Sultan dengan gelaran "Sultan Gombak". Setelah baginda Raja Gombak mangkat, maka cucunda baginda yang telah dijadikan putera angkat, iaitu Raja Ahmad, ditabal menjadi Sultan Kelantan pada 1584M (992H). Dengan gelaran Sultan Ahmad, Baginda telah berkawin dengan Cik Banun Puteri Seri Nara DiRaja, iaitu sepupu kepada Raja Hussein di sebelah istri Lela Wangsa Pahang. Baginda berdua telah dikurniakan seorang puteri dinamakan Cik Siti Wan Kembang.<sup>4</sup>

Baginda Sultan Ahmad mangkat pada 1589M, sewaktu puteri baginda Cik Siti Wan Kembang berusia 4 tahun, dan oleh sebab itu Raja Hussein dari Johor telah dilantik menjadi Pemangku Raja Pemerintah Kelantan. Bila Raja Hussein mangkat pada 1610M (1018H), maka Cik Wan Kembang ditabalkam menjadi Permaisuri Kelantan. Baginda bersemayam di Gunung Chinta Wangsa, Ulu Kelantan, kira-kira 40 kilometer ke arah tenggara Kuala Krai.

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Keturunan Raja-Raja Kelantan dan Peristiwa-peristiwa Bersejarah*, (Kota Bharu : Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1981),.h.47

Pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Chinta Wangsa menjadi terkenal menyebabkan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri termasuk juga orang-orang Arab yang menggelarkan Cik Wan Kembang dengan panggilan "Paduka Cik Siti". Baginda mempunyai seekor kijang yang kemudiannya menjadi lambang kebesaran negeri Kelantan.

Semasa dalam pemerintahan Cik Siti Wan Kembang, telah timbul sebuah lagi kerajaan berpusat di Jembal, di bawah pemerintahan Raja Sakti 1638M (1046H). Setelah baginda mangkat, maka putera baginda, Raja Loyor telah ditabal menjadi Sultan pada 1649M (1059H). Baginda dianugerahkan dengan dua orang cahaya mata iaitu seorang putra, Raja Sakti yang mangkat sewaktu masih kecil dan seorang puteri bernama Putri Saadong.<sup>5</sup>

Hubungan baik telah terjalin di antara Kerajaan Cik Siti Wan Kembang dengan Kerajaan Loyor di Jembal. Baginda mengambil Putri Saadong sebagai anak angkat yang akan mewarisi takhta kerajaan sepeninggalannya nanti.

Puteri Saadong seorang gadis ayu yang cantik dan jelita, digelar oleh penduduk Gunung Chinta Wangsa sebagai Putri Wijaya Mala. Perihal kecantikan Puteri Saadong itu telah sampai kepada Maharaja Siam yang menghantar utusan untuk meminang Puteri Saadong, tetapi ditolak. Puteri Saadong telah dikawinkan dengan Raja Abdullah iaitu sepupunya, dan telah dimahkotakan di Kota Tegayong (Tanah Serendah Sekebun Bunga Cherang Tegayong) dan kemudiannya dipindahkan ke Kota Jelasin di Kota Mahligai.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.52.

Putri Saadong telah diculik oleh Penglima Tentera Siam bernama Phraya Decho dan dibawa kepada Narai Maharaja Siam (1656-1688), kerna kesetiaannya pada suami baginda tidak boleh disentuh oleh Maharaja Siam. Setelah Putri Saadong kembali ke Kelantan telah berlaku pergaduhan dengan Raja Abdullah. Akibat pergaduhan itu Raja Abdullah terkorban kerna kena tikaman cucuk sanggul Putri Saadong.

Selepas kemangkatan Raja Abdullah, Putri Saadong telah melantik Raja Abdul Rahim iaitu saudara raja Abdullah menjadi Sultan di Kota Mahligai pada 1671M (1082H) dan dikawinkan dengan janda Raja Abdullah, anak Penghulu Ngah Jembal. Selepas itu Putri Saadong menjadi Raja di Bukit Marak dan sejak itu kisahnya tidak dapat dikesan lagi.<sup>6</sup>

Kemudian, Raja Abdul Rahim telah mangkat ditikam oleh rakyatnya di tepi Tasek Lelayang Mandi. Dengan itu putuslah sejarah "kerajaan mahligai" dan wujud pula Kerajaan Jembal yang pada waktu itu terletak dibawah pemerintahan Raja Omar yang bergelar Sultan Omar pada 1675M (1086H).

Raja Omar adalah adinda kepada Raja Loyor yang sebelum itu telah bergelar Temenggong Sultan Omar mempunyai lima orang putera dan putri, iaitu Raja Kecil Sulung, Raja Ngah yang bergelar Raja Hudang, Raja Nah, Raja Sakti dan Raja Pah. Setelah Raja Omar mangkat pada 1721M (1132H), Baginda Long Bahar telah ditabal menjadi Sultan di Jembal atas kehendak putri sulungnya, Raja Kecil Sulung. Baginda Long Bahar adalah putera Raja Petani (Wan Daim) yang bergelar Datuk

---

<sup>6</sup>*Ibid* . h. 61.

Pengkalan Tua yang berhijrah ke Kelantan bersama ayahandanya dan berkahwin dengan Raja Pah Putri Sultan Omar dan bersemayam di Sening dekat Jembal.

Long Sulaiman (Wan Anom Long Nik) anak Long Bahar dengan Raja Perempuan Patani bergelar Mas Kelantan mempunyai seorang putera bernama Long Yunus dan dua orang putri, iaitu Tuan Dewi dan Tuan Kembang yang berkahwin dengan Long Deraman putera Tuan Senik Geting yang memerintah di Legeh. Pada 1756M (1169H) telah berlaku serangan untuk merebut takhta dan akhirnya telah membawa kemangkatan Long Sulaiman. Berikutnya Long Pandak, sepupu Long Sulaiman telah dilantik menjadi Raja Kubang Labu, dan adiknya pula Long Muhammad dilantik menjadi Raja Muda.

Kemudiannya pada 1758M, Long Pandak telah mangkat di tangan Long Deraman kerna membalas dendam terhadap perbuatan Long Pandak membunuh istrinya Tengku Tengah iaitu adik Long Deraman. Selepas itu Long Muhamad dilantik menjadi Sultan di Kota Kubang Labu. Dalam masa pemerintahan Long Muhammad telah meletus peperangan antara pihak Long Muhammad yang dibantu oleh Long Deraman dengan Long Gaffar, putera kepada Raja Reman di Hulu Perak. Dalam peperangan pada 1762M, Long Muhammad dan Long Deraman telah tumpas dan Kerajaan Kubang Labu telah dapat dikuasai oleh Long Yunus. bagi mengenang jasa Long Gaffar yang membantunya dalam peperangan itu, maka baginda Long Yunus telah melantik Long Gaffar menjadi Perdana Menteri memerintah dari kawasan Jeram sampai ke Pasir Tumbuh. Baginda Long Yunus telah berjaya menyatukan seluruh pemerintahan negeri Kelantan yang banyak itu dengan meletakkannya dibawah satu pemerintahan pusat sahaja.

## **2. Penduduk**

Unjuran penduduknya pada tahun 2010 adalah seramai 1,670,500 orang. Kaum Melayu merupakan kaum yang terbesar dengan 95%, diikuti dengan kaum Cina 3.8%, kaum India 0.3% dan lain-lain kaum 0.9%. Berdasarkan bancian tersebut, 95% beragama Islam, diikuti dengan agama Buddha 4.4%, Kristian 0.2%, Hindu 0.2% dan lain-lain agama 0.2%.

## **3. Iklim**

Negeri Kelantan mengalami iklim tropika yang baik, di mana hampir setiap tahun hujan turun dengan berselang-seli mengikut bulan tertentu. Biasanya, hujan yang lebat akan berterusan selama beberapa hari atau selama beberapa bulan. Bulan-bulan yang mengalami hujan yang paling kerap ialah bulan November, Disember dan Januari, iaitu pada musim tengkujuh. Suhu setiap hari dianggarkan lebih kurang 21 °C

## **4. Kerajaan**

Sultan Negeri Kelantan<sup>7</sup> merupakan Ketua Perlembagaan Negeri. Di bawah perlembagaan negeri, kuasa perundangan dipunyai oleh Dewan Undangan Negeri. Dewan ini melantikkan ahli Dewan untuk membentuk Majlis Mesyuarat Kerajaan (EXCO).

EXCO, yang diketuai oleh Menteri Besar, memegang kuasa eksekutif dan merupakan badan yang membuat dasar kerajaan negeri. Menteri Besar yang dilantik oleh Sultan adalah daripada parti politik yang memenangi kerusi yang terbanyak di dalam Dewan Undangan. Menteri Besar Kelantan sekarang ialah Tuan Guru Dato'

---

<sup>7</sup> Mohd Zain Saleh, *Keluarga Diraja Kelantan Darul Naim, Istana Negeri Kubang Kerian*, (Kota Bharu : Percetakan Zul Rahim, 1987), h.59



Nik Abdul Aziz Nik Mat yang juga merupakan Mursyidul Am kepada parti yang memerintah negeri Kelantan, Parti Islam Se-Malaysia(PAS).

## **5. Ekonomi**

Ekonomi Kelantan adalah berasaskan pertanian padi, getah dan tembakau. Kegiatan menangkap ikan di persisiran pantai sepanjang 96 kilometer turut merupakan aktiviti ekonomi yang penting. Industri kecil-kecilan yang menggunakan kemahiran tradisi dalam penghasilan kraftangan seperti batik, ukiran kayu dan tenunan songket juga agak meluas. Selain itu, kegiatan pembalakan juga aktif kerana ia keluasan hutan Kelantan masih banyak. Beberapa tahun kebelakangan ini, pelancongan, terutamanya ke pulau-pulau makin popular.

Pasar Besar Siti Khadijah di pusat bandar Kota Bharu masih merupakan tarikan utama. Kebanyakan peniaga di sini adalah wanita dengan deria perniagaan bagus.

Kelantan merupakan antara negeri termiskin di Malaysia<sup>8</sup>, dengan KDNK per kapita sekitar RM6000, kira-kira satu pertiga negeri kaya seperti Selangor dan Pulau Pinang. Bagaimanapun, ramai penduduk Kelantan yang bekerja sendiri, dan data ini tidak termasuk dalam perkiraan KDNK.

## **6. Budaya**

Kelantan merupakan negeri yang berjiran dengan wilayah-wilayah selatan Thailand yang dikenali dahulu sebagai Negeri Patani Darul Salam. Dari segi sejarahnya, Kelantan mempunyai hubungan sejarah yang sangat akrab dengan Kesultanan Melayu Patani yang didokongi oleh Kesultanan Melayu Islam. Di mana

---

<sup>8</sup> *Ibid.* h.78.

Kesultanan Melayu Kelantan mempunyai pertalian darah dengan Kesultanan Melayu Patani dan juga Kesultanan Melayu Negeri Champa. Setelah Kesultanan Melayu Patani dikhianati oleh Siam dan British maka ia telah demonisasi oleh Thailand. Negeri Patani telah dipecahkan kepada wilayah-wilayah kecil yang terdiri dari Yala (Jala), Narathiwat (Menara), Patani dan Songkla (Senggora).<sup>9</sup>

Di bawah perjanjian British-siam pada tahun 1948 demografi pemerintahan selatan Siam telah dipisahkan. Kelantan di bawah Malaysia manakala negeri-negeri Patani di bawah Thailand.

Oleh yang demikian Kelantan mempunyai budaya yang unik yang sangat berkait rapat dengan budaya Negeri Patani. Asimilasi antara budaya Melayu, Siam dan Islam menghasilkan permainan rakyat seperti Dikir Barat, Main Putri, Mak Yong dan seumpamanya. Mak Yong dipengaruhi oleh budaya Siam (Thailand), sementara Dikir Barat pula mempunyai unsur-unsur Islam. Main Putri pula dikatakan diresapi oleh budaya Hindu.

Kelantan juga kaya dengan makanan tradisional dan berlainan dengan makanan Melayu di negeri lain. Di antara makanan tradisional Kelantan yang berkhasiat dikenali sebagai budu.

## **7. Pendidikan**

Dari sudut pendidikan, Kelantan amat menitikberatkan pendidikan agama. Suatu ketika dulu Kelantan pernah menjadi pusat tumpuan ulama dari serata tempat dan sehingga kini masih terkenal dengan nama jolokan negeri Serambi Mekah. Banyak rakyat dari luar Kelantan datang ke sini semata-mata untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 82.

mendalami ilmu agama. Oleh sebab itu tidak hairanlah jika sekolah-sekolah agama atau lebih dikenali sebagai sekolah pondok muncul bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Sekolah Pondok Terusan yang terletak di Pasir Tumboh Kota Bharu, merupakan antara sekolah pondok yang terkenal di Kelantan dan Tok Guru Kenali pula merupakan tokoh guru agama yang sudah tidak asing di Kelantan suatu ketika dulu.<sup>10</sup>

Di samping pendidikan agama, kerajaan Kelantan juga menitikberatkan pendidikan akademik. Di samping sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan, sekolah swasta juga banyak didirikan di Kelantan untuk memberi peluang kepada pelajar yang tercicir menyambung pelajaran mereka. Institut Padang Merdeka [IPM], Sekolah Kadir Adabi, Institut Za'ba, dan Kolej Budaya merupakan antara sekolah swasta yang sudah terkenal di Kelantan. Sekolah-sekolah ini turut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pelajar di luar Kelantan. Sebagai sekolah yang mengutamakan kualiti sekolah-sekolah swasta ini juga mampu melahirkan pelajar yang cemerlang setanding dengan sekolah-sekolah bantuan penuh kerajaan.

## **B. Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Islam**

### **1. Sejarah Berdiri**

Bandar Kota Bharu<sup>11</sup> telah ditubuhkan pada tahun 1844 dan diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan Negeri Kelantan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Al-Marhum Sultan Muhammad Ke-II. Pada tahun 1936, bandar Kota Bharu dinaik tarafkan sebagai Majlis Bandaran Kota Bharu (MBKB). MBKB telah dimansuhkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 55.

<sup>11</sup> *Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995), h. 34

dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran pada tahun 1971. Pada tahun 1978 Lembaga Bandaran Kota Bharu disusun semula dan dinaik tarafkan kepada Majlis Perbandaran Kota Bharu pada tahun 1978.

*Kota Bharu* merupakan sebuah pusat bandar utama bagi Negeri Kelantan . Perkembangan bandar Kota Bharu bermula pada tahun 1844 iaitu sebagai sebuah penempatan *DiRaja* kini berfungsi sebagai pusat utama bagi pentadbiran, perdagangan, kewangan, kebudayaan dan pendidikan. Sehubungan dengan itu, Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) merupakan sebuah organisasi yang diwujudkan bagi mengendalikan pentadbiran bandar Kota Bharu. Keluasan Bandar Kota Bharu adalah seluas 115.64 km persegi dengan jumlah penduduk melebihi 300 ribu orang.

## **2. MPKB- BRI**

Sejarah Penubuhan Majlis Perbandaran Kota Bharu<sup>12</sup> (MPKB) adalah organisasi Majlis Kerajaan Negeri yang menjalankan operasi di sekitar bandar Kota Bharu yang meliputi 65 seksyen. Keluasan kawasan pentadbirannya ialah 115.64 kilometer persegi yang merangkumi kawasan dari Pantai Cahaya Bulan ke Pantai Sabak di sebelah utara, kawasan yang bersempadan dengan kawasan Batu 5, Jalan Pasir Mas dan Jalan Kuala Krai ke jambatan Pasir Tumboh di sebelah selatan, Sungai Pengkalan Datu dan Wakaf Stan di sebelah timur dan disebelah barat Sungai Kelantan. Kawasan MPKB adalah merupakan modulus pembangunan bagi Negeri Kelantan dengan terletaknya bandar Kota Bharu sebagai pusat pentadbiran,

---

<sup>12</sup> Buletin MPKB-BRI: Edisi September 2011

perdagangan dan kewangan. Manakala Pengkalan Chepa sebagai pusat perindustrian dan Kubang Kerian sebagai Pusat Institusi.

Pada tahun 1950<sup>13</sup>, ianya dikenali sebagai Majlis Bandaran Kota Bharu. Majlis ini kemudiannya dinaiktaraf menjadi Lembaga Bandaran Kota Bharu pada tahun 1971. Pada tahun 1978, LBKB disusun semula dan sekali lagi dinaiktaraf menjadi Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB). Nama MPKB kemudiannya dirangkaikan bersama Banda Raya Islam sehingga menjadi MPKB-BRI apabila YAB Dato Haji NikAbdul Aziz Bin Nik Mat menerapkan dasar Membangun Bersama Islam pada tahun 2003.

Kawasan MPKB adalah merupakan nodus pembangunan bagi Negeri Kelantan dengan terletakinya bandar Kota Bharu sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan kewangan. Manakala *Pengkalan Chepa* sebagai pusat perindustrian dan *Kubang Kerian* sebagai Pusat Institusi.

### **3. Visi dan Misi**

#### **a)Visi**

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam sebagai sebuah organisasi yang unggul akan membangun dan memajukan bandar Kota Bharu sebagai sebuah Bandaraya Islam yang bersih, indah dan berdikari berteraskan dasar Membangun Bersama Islam.

#### **b)Misi**

Misi penubuhan MPKB-BRI ialah Membawa kemakmuran dan kesejahteraan hidup kepada warga kota dan mempertingkatkan kemajuan

---

<sup>13</sup> Rahmat bin Sharipan. *Pengembang Politik Melayu Tradisional Kelantan 1776-1842*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1979), h. 231

sosio-ekonomi serta memberisumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi bandar Kota Bharu khasnya dan negeri Kelantan amnya.

Terdiri dari 12 jabatan antaranya:<sup>14</sup>

- Jabatan Khidmat Pengurusan
- Jabatan Kewangan
- Jabatan Penilaian
- Sekretariat Bandar Raya Islam
- Jabatan Penguatkuasaan
- Jabatan Pelesenan
- Jabatan Pembangun Korporat
- Jabatan Perancang Dan Bangunan
- Jabatan Kejuruteraan
- Jabatan Perkhidmatan Bandar
- Jabatan Perhubungan Awam
- Jabatan Pembangunan Islam

#### **4. Pentadbiran MPKB**

Cara perlantikan ahli-ahli pentadbir tempatan ialah melalui iklan dalaman. Calon-calun yang berkeelayakan dikehendaki mengisi borang permohonan. Calon-calun yang berjaya akan dipanggil untuk sesi temuduga dan jika berjaya dalam temuduga tersebut calon barulah diterima sebagai kakitangan Majlis. Cara perlantikan yang kedua ialah calon-calun luaran. Iklan jawatan kosong akan disiarkan di dalam akhbar tempatan. Sesiapa yang berminat dan berkeelayakan bolehlah memohon dengan mengisi boring dan tapisan akan dibuat melalui proses

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 234

temuduga. Calon-calun yang berjaya akan dipanggil untuk berkhidmat dengan MPKB-BRI.

Majlis diketuai oleh Yang Dipertua sebagai Ketua Esekutif. 24 orang ahli majlis termasuk Yang Dipertua turut dilantik sebagai penggubal dasar. Jentera pentadbiran majlis diketuai oleh setiausaha dan dibantu oleh 10 pengarah jabatan serta 29 bahagian pelaksana. Sehingga 2004 majlis mempunyai kakitangan tetap seramai 1207 orang.

## **5. Ekonomi**

MPKB-BRI telah memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi khususnya di bandar Kota Bharu. MPKB telah memberikan kebenaran bagi pembinaan premis-premis perniagaan seperti hotel-hotel, pasaraya dan bangunan pejabat.

Setakat ini terdapat projek pembangunan yang dilaksanakan oleh MPKB-BRI iaitu Pembangunan Semula Tapak Bengkel MPKB di Jalan Kuala Krai. Komponen projek ini meliputi servis apartment, lot komersial rumah kedai, medan selera, pejabat, surau dan landskap.

Di samping itu juga terdapat cadangan Pembangunan Projek Airport Resort City di Mukim Telok Kilang Daerah Kemumin Kota Bharu. Menara Pusat Dagangan Kota Bharu juga turut dibina di Seksyen 7, Kota Bharu manakala projek-projek lain ialah cadangan Pembangunan Semula Seksyen 10, Kota Bharu, Projek Pasar Awam Bersepadu Wakaf Che Yeh Kota Bharu, Projek Bandar Satelit Pasir Tumbuh. Cadangan Pusat Pembangunan Zon 1, Zon Wilayah Kraf Pantai Cahaya

Bulan, Kota Bharu dan Projek Kilang sampah Organik menggunakan kaedah IBR-EATAD.

Secara keseluruhannya, komponen projek-projek yang dilaksanakan adalah perumahan, taman rekreasi, kompleks membeli-belah, hotel, tempat parking, surau, ruang perniagaan dan sebagainya. Projek-projek yang dilaksanakan ini telah membuka peluang ekonomi khususnya dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan dan memberikan pulangan yang lumayan terhadap sumber pendapatan negeri. Rakyat dapat menikmati kemakmuran ini dengan memperolehi peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan keluarga.

Kesimpulannya, MPKB-BRI telah memainkan peranannya dengan berkesan dalam bidang ekonomi demi kemajuan bandar Kota Bharu. Rakyat negeri Kelantan dapat menikmati kemakmuran ekonomi negeri Kelantan.

## **6. Pendidikan**

Selain faktor ekonomi, Majlis Perbandaran Kota Bharu tidak pernah lupa akan kepentingan sektor pendidikan di bandar ini . Pelbagai jenis sekolah telah disediakan sama ada sekolah rendah mahupun menengah. Terdapat sebanyak 59 buah sekolah kebangsaan seluruh Kelantan, 2 buah sekolah kebangsaan cina dan 5 sekolah teknik. Pihak Majlis juga menekankan kepentingan ilmu dalam kalangan ahli-ahli Majlis. Kakitangan Majlis diberi latihan berkenanaan dengan cara perlaksanaan dan bidang tugas kakitangan. MPKB-BRI juga menggalakkan kakitangan melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi lagi. Penguasaan ilmu membolehkan kakitangan majlis boleh melaksanakan tugas



dengan lebih cekap dan efisien. Ini membuktikan bahawa ahli Majlis sentiasa setanding dengan ahli-ahli malis perbandaran lain dari segi kualiti pendidikan.

## 7. Keagamaan

MPKB-BRI telah memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan Kota Bharu sebagai bandar raya Islam.

Mengikut catatan Sejarah Islam masuk ke Kelantan lebih awal daripada Melaka. Islam dicatat masuk ke Kelantan melalui Champa terus ke Pattani dan tiba di Kelantan. Ia dibuktikan melalui Batu Bersurat yang bertarikh 1303 Masihi yang ditemui di Kuala Berang. Ini bermakna sebelum Islam sampai ke Terengganu terlebih dahulu sampai ke Kelantan kerana laluanannya melalui Pattani.<sup>15</sup>

Selain itu, kepingan wang emas ditemui di Kota Kubang Labu di Pasir Pekan, Tumpat pada 1912 yang tercatat tarikh 577 Hijrah bersamaan 1181 Masihi juga antara bukti ketibaan Islam. Bermula dari situ, Islam terus tersebar di Kelantan dan masjid menjadi halaqah menyebarkan ilmu kepada anak-anak murid yang datang dari segenap ceruk rantau. Masjid tertua di Kelantan yang dibina lebih 300 tahun lampau masih boleh dilihat sehingga sekarang iaitu Masjid Kampung Laut.

Menteri Besar, Tuan Guru Dato'Nik Abdul Aziz menjelaskan tumpuan diberi kepada konsep bandar raya Islam iaitu melahirkan manusia yang sentiasa beribadat kepada Allah Taala (SWT).

Wawasan bandar raya Islam<sup>16</sup> bergerak seiring dengan dasar 'Membangun Bersama Islam'. Tiga aspek penting diberi tumpuan ke arah kelahiran sebuah bandar raya iaitu falsafah dan konsep perancangan bandar raya Islam, konsep dari

---

<sup>15</sup> Ibrahim Syukri. *History of the Malay Kingdom of Patani*. (Ohio, Center for International Studies, 1985), h.77

<sup>16</sup> Rahmat bin Sharipan, *op cit*, h, 46.

perspektif sunnah dan cabaran ke arah mewujudkan sebuah bandar raya Islam. Matlamat utama kerajaan negeri adalah menjadikan Kota Bharu sebuah bandar raya amanah, bandar raya keadilan, bandar raya aman, bandar raya sejahtera, bandar raya kebajikan, bandar raya maju dan bertenaga. Bandar raya ilmu, bandar raya kesenian serta keindahan dan bandar raya harmoni. Konsep dan falsafah yang dipakai adalah iman dan taqwa. Selain itu, majlis ilmu dan menghayati ajaran Islam Dalam pentadbiran, pembangunan insan dan fizikal juga dititikberatkan.

MPKB-BRI telah menerapkan elemen bandar raya Islam seperti mengharamkan kegiatan perjudian, permainan video ganas, tempat-tempat hiburan dan mengawal penjualan arak. Usaha ke arah melahirkan Bandar Raya Islam dilaksanakan melalui dua fasa iaitu pertama (2003-2005) melaksanakan program-program yang digaris dalam Pelan Pembangunan Awalan (interim development plan). Fasa kedua (2006-2015) iaitu melaksanakan rancangan sebagaimana yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Kota Bharu Bandar Raya Islam. Kesungguhan MPKB mezhahirkan bandar raya Islam sudah dizahirkan sejak 14 tahun lalu, apabila menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Islam dan Jabatan Pembangunan Islam. Ia merupakan manifestasi MPKB bagi memantapkan pentadbirannya.<sup>17</sup>

Tuan Guru Dato' Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat telah menggariskan ciri-ciri utama Kota Bharu Bandar Raya Islam iaitu keilmuan, kepatuhan, kabajikan, kebersihan dan kesejahteraan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

MPKB-BRI juga sentiasa menekankan penghayatan keagamaan dalam kalangan ahli Majlis. Kuliah agama dan tazkirah diadakan pada setiap pagi Ahad bertempat di Dewan Bunga Raya. Manakala KULiah agama pula pada setiap hari Khamis bermula jam 8 hingga 9 pagi. Penceramah biasanya dijemput khas daripada Yayasan Islam Kelantan. Selain itu Kem Kecemerlangan Solat juga diadakan dan juga tazkirah lain di pasaraya.

MPKB-BRI telah berjaya memainkan peranannya dari segi keagamaan. Keadaan ini jelas terbukti apabila wujudnya suasana yang tenang dan damai di negeri Kelantan.

## **8. Kemasyarakatan**

MPKB-BRI juga merancang dan melaksanakan program<sup>18</sup> kemasyarakatan sebagaimana dalam Program Local Agenda 21(LA 21). Program LA 21 yang dilaksanakan di MPKB-BRI menepati format Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Keutamaan bagi program LA 21 ini ialah program-program kemasyarakatan seperti program kebersihan dan keselamatan, ceramah kesedaran dan motivasi, Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan lain-lain. Antara aktiviti yang telah dilaksanakan oleh pihak MPKB-BRI ialah aktiviti gotong-royong, Ceramah Kesedaran Pembangunan Insan, Program Pembangunan Ekonomi dan juga aktiviti bersama masyarakat dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Penduduk (JKP).

Bahagian Pembangunan Masyarakat, MPKB-BRI seperi berkait rapat dan saling berhubungan dengan masyarakat terutama warga kota di sekitar bandar Kota

---

<sup>18</sup> Jabatan Pembangunan Masyarakat, Buletin: MPKB-BRI, November 2010

Bharu. Bagi meningkatkan keupayaan dan peranan bahagian ini, sumber bagi dana Tabung Amal dan Kebajikan perlu diperkenalkan lagi dengan melakukan pelbagai aktiviti yang boleh menyumbang pendapatan kepada tabung ini dan seiring dengan fungsinya boleh diperluaskan lagi dan dapat membela nasib golongan yang kurang berkemampuan di sekitar bandar Kota Bharu. Fungsi bahagian ini adalah seperti bertepatan dengan ciri Bandar Raya Islam iaitu Kebajikan dan Kesejahteraan.

Antara aktiviti yang telah dijalankan:

- 1) Majlis Muafakat MPKB-BRI Bersama Masyarakat
- 2) Peranan Tabung Amal dan Kebajikan untuk segenap lapisan masyarakat yang miskin dan menghadapi masalah. Sebagai contoh, ibu tunggal, anak yatim, anak-anak terbiar dan lain-lain.
- 3) Bantuan Bencana Alam (kebakaran/ribut)
- 4) Projek Pembangunan Ekonomi untuk membantu golongan miskin. Misalnya Projek Kelas Tadika, Projek Jahitan Pakaian dan Projek membuat kerepek.
- 5) Bantuan Melalui Program Pembasmian Kemiskinan Bandar Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang terdiri daripada Projek E-Kasih dan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar.
- 6) MPKB-BRI juga menekankan Pembangunan Insan. Sebagai contoh Ihya' Ramadan, Tazkirah di pasar raya (sebelum solat zuhur dan Asar), Kem Kecemerlangan Solat dan Kuliah Agama.

MPKB-BRI menekankan pembangunan kemasyarakatan secara menyeluruh sesuai dengan falsafah MPKB-BRI.

## 9. Kebudayaan

Negeri Kelantan terkenal dengan keindahan semula jadi dan kaya dengan adat resam dan kebudayaan yang masih kekal sejak berkurun lamanya. Lantaran itu, kena pada tempatnya Kelantan digelar ‘Akar Umbi Kebudayaan Melayu’.<sup>19</sup>

MPKB-BRI telah menggalakkan pengekalan ciri-ciri budaya tradisional masyarakat Kelantan sebagai satu daya tarikan dalam kalangan pelancong asing. Bagi menghidup dan mempopularkan permainan tradisional seperti wau, gasing, rebana ubi, pertunjukan wayang kulit dan seni silat. Gelanggang Seni telah dijadikan pusat pameran khazanah budaya dan kesenian yang diwarisi masyarakat Kelantan sejak turun-temurun. Pertunjukan kebudayaan dan kesenian sering diadakan di gelanggang seni. Gelanggang Seni dibuka 3 kali seminggu pada bulan Mac hingga Oktober setiap tahun.

Bagi mengekalkan warisan budaya Melayu menjadi tatapan umum, Istana Batu telah dijadikan Muzium Diraja untuk mempamerkan maklumat bersejarah dan khazanah Kesultanan Melayu Kelantan. Selain itu, Muzium Negeri juga turut mempamerkan barangan seni hasil kerja tangan dan berbagai-bagai peralatan tradisional Kelantan.

Manakala Muzium Seni dan Kampung Kraftangan turut mempamerkan pelbagai bentuk kraftangan tradisi Kelantan yang dihasilkan oleh tukang-tukang mahir tempatan. Di Kampung Kraftangan pula para pengunjung berpeluang menyaksikan sendiri bagaimana barangan kraftangan dihasilkan. Demonstrasi sulam-menyulam, menenun, mencanting batik serta mengukir kayu dan perak turut

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

disediakan. Para pengunjung juga berpeluang membeli hasil seni pilihan mereka di kampung ini.

Sebagai kesimpulannya, MPKB-BRI telah mengambil pelbagai inisiatif untuk menjadikan bandar Kota Bharu sebagai bandar yang kaya dengan ciri-ciri budaya tradisional. Bandar Kota Bharu telah menjadi tarikan pelancong kerana mempunyai ciri-ciri tradisional yang unik dan pelik.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU-BRI DAN PENGUATKUASAAN AURAT**

##### **A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Kecil**

###### **1. Undang-Undang Kecil Akta (27A)**

MPKB-BRI<sup>1</sup> telah menubuhkan undang-undang tubuh, undang-undang kecil dan garis panduan penubuhan. Antara undang-undang tubuh ialah :1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar Yang Cekap dan Berkesan:- Pengurusan Sisa Pepejal- Pembersihan dan Pengindahan Kawasan- Penyenggaraan Parit dan Longkang- Pembinaan dan Penyenggaraan Jalan- Penyenggaraan Bangunan-bangunan Awam- Penyenggaraan Tempat-tempat Awam- Perlindungan dan Pengawalan Kesihatan Awam- Penyenggaraan Tanah-tanah PerkuburanMengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:- Cukai Taksiran- Bayaran-bayaran Lesen & Denda- Geran Pelancaran- Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan- Geran Untuk Projek-projek Pembangunan- Geran Penyenggaraan Jalan Melaksanakan Projek-projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:- Perumahan- Perindustrian & Perdagangan- Kemudahan-kemudahan Rekreasi- Infrastruktur Bandaran. Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976 (Akta 172). Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya) Mengatur, Mengawal dan

---

<sup>1</sup> . Pusat Kajian Strategik, *Dasar-dasar Utama Kerajaan Negeri Kelantan* (Kota Bharu,: Pustarak Enterprise, 2005), h. 200

Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya) Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Methodologinya. Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.1.Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133) Meluluskan Pelan Bangunan) Meluluskan Pelan Bangunan. Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut kehendak-kehendak Yang Ditetapkan) Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan. Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan.

## **2. Kompaun/Denda**

Apakah Undang-Undang Kecil? Undang-Undang Kecil<sup>2</sup> atau 'by-laws' dalam bahasa Inggeris adalah perundangan subsidiari kepada undang-undang ibu. Ia digubal oleh Pihak Berkuasa Tempatan. Perundangan subsidiari ini dikenali juga dengan nama Perintah, Kaedah, Peraturan dan sebagainya Pindaan Undang-Undang Kecil yang telah diwartakan boleh dibuat daripada masa ke semasa berdasarkan keperluan mengikut prosedur penggubalan yang sama Kadar Kompaun Berdasarkan Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MPKB (Pindaan) 2002, pelanggaran mana-mana undang-undang kecil boleh dikompaun dan tawaran

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



bayaran kompaun adalah sehingga maksima RM 500.00. Manakala kadar maksima kompaun kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) ialah RM 1,000.00. Penalti/Denda Sekiranya tawaran kompaun tidak dijelaskan, pelanggaran mana-mana undang-undang kecil boleh didakwa di mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan penalti/denda sehingga RM2,000.00 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagik kesalahan yang berterusan selepas sabitan, denda boleh dikenakan maksima RM200.00 sehari

### **3. Arahan Menutup Aurat**

Arahan Menutup Aurat Hanya Kepada Peniaga Manakala Wanita Islam Yang Mendedah Aurat Di Bandar Kota Bharu Hanya Akan Diberi Nasihat Supaya Menutupnya.<sup>3</sup>

Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI)<sup>4</sup> tidak akan mengeluarkan kompoun kepada mana-mana wanita Islam yang datang ke Bandar ini tanpa berpakaian menutup aurat. Sebaliknya mereka hanya akan diberi nasihat supaya berbuat demikian. Pengarah Perhubungan Awam MPKB-BRI, Encik Azman bin Mohd Daham berkata, semua wanita Islam yang datang ke Bandar Kota Bharu sama ada untuk membeli belah atau sebagainya, kecuali menjalankan aktiviti perniagaan tidak akan dikenakan kompoun kerana tidak menutup aurat sebaliknya

---

<sup>3</sup> Ramli Yamat , *Pelaksanaan Undang-undang Kecil MPKB-BRI (Kuala Lumpur: NSTP Press 2008)*,h. 25

<sup>4</sup> Zaimah Binti Haji Muhammad, (Pegawai Pembangunan Masyarakat), *Wawancara* pada 14 Julai 2010

<sup>5</sup>.Azman Mohd Daham, (Pegawai MPKB) *Wawancara*, tanggal 14/10/2011.

hanya akan dikeluarkan kepada peniaga serta kakitangan wanita yang beragama Islam yang menjalankan aktiviti perniagaan di Kota Bharu.

Kompoun sehingga RM500 hanya akan dikeluarkan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) kepada mereka yang gagal mematuhi Undang-undang Kecil Trade Perniagaan MPKB-BRI 1986 (pindaan 2002) yang diluluskan oleh kerajaan negeri melalui pekeliling yang dikeluarkan oleh Majlis yang ditandatangani oleh Yang Dipertua, MPKB-BRI Haji Shafie Ismail. Di bawah undang-undang kecil Atika Berpakaian wanita Islam ini jika disabitkan dengan kesalahan boleh di kompoun tidak lebih RM500.

Pengarah Perhubungan Awam MPKB-BRI, Encik Azman Mohd Daham ketika mengadakan sidang akhbar mengenai isu pemakaian tudung, gincu dan kasut tumit tinggi yang dibesar-besarkan oleh media semalam berkata, penguatkuasaan larangan mendedah aurat hanya dikenakan kepada golongan peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan mereka di Bandar Kota Bharu tanpa mengira masa siang ataupun malam bukannya kepada pengunjung Bandar ini. Beliau menyatakan ini bagi mengulas laporan media yang dipetik daripada Bernama kononnya Majlis akan mengenakan kompoun kepada semua wanita yang tidak menutup dan melarang mereka memakai gincu bagi mengelakkan gejala maksiat seperti rogol dan sebagainya.

Arahan supaya menutup aurat kepada wanita Islam samalah seperti arahan Jabatan Kesihatan yang mewajibkan mereka memakai tutup kepala serta memakai apron apabila menyediakan dan menghidang makanan. Menurut beliau lagi, walaupun undang-undang kecil ini tidak melibatkan orang awam, namun Majlis sentiasa

mengadakan kempen supaya menutup aurat kepada wanita Islam yang bertandang ke Bandar ini.<sup>5</sup>

Walaupun arahan ini dikecualikan kepada wanita bukan Islam, mereka dinasihatkan supaya berpakaian sopan supaya tidak menimbulkan keghairahan mana-mana pihak. Encik Azman berkata, penguatkuasaan peraturan tersebut bukannya perkara baru malah ianya dilaksanakan semenjak 8 tahun lalu dan surat arahan peringatan tersebut dikeluarkan setiap tahun oleh Yang Dipertua, MPKB-BRI kepada semua pemilik premis supaya mematuhiinya.

## **B. Isi Undang-Undang Kecil**

Isi Undang-undang kecil MPKB-BRI mengenai aurat ialah:

### **Bagian 2: UUK Tred, Perniagaan dan perindustrian MPKB (Pindaan)2002**

Bagian kedua memuat berbagai perkara kesalahan yang dapat dituntut enakmen ini yaitu etika pakaian dan batasan aurat menurut perspektif Islam, etika pakaian non-muslim, undang-undang aurat dan pemakaian sopan (menutup aurat), perbuatan dan perkataan tidak sopan, pondan (peria menyamai wanita), menghasut perceraian, khalwat, zina atau bersyubhat melakukan zina, liwath, musahaqah, hamil luar nikah, melarikan istri orang, melacurkan istri atau anak atau diri sendiri, menjual atau memberikan anak, menjadi mucikari, menggalakkan perbuatan maksiat, menyatakan orang lain kafir, minum yang memabukkan, makan di bulan Ramadhan, menghina undang-undang, bersyubhat, ingkar perintah mahkamah atau sultan, dan lainnya. Salah satu nuansa Islam yang kental di Kelantan ditunjukkan

---

<sup>5</sup>*The Star*, Selasa 31 Mei 2011. H. 12

dengan papan iklan dan buletin yang ada di kota ini dengan melibatkan wanita dengan pakaian yang menutup aurat.<sup>6</sup>

MPKB bertanggungjawab<sup>7</sup> secara langsung melaksanakan perancangan Bandaraya Islam, namun demikian bidang kuasanya hanyalah menyedia, menjaga dan menyelenggara jalan-jalan, taman, perlesenan dan pengawalan premis-premis perniagaan. MPKB-BRI tidak mempunyai kuasa secara langsung untuk mengawal tatakelakuan/moral masyarakat sebagaimana polis dan JAHEIK. Bidang kuasa MPKB-BRI dalam mengawal tatakelakuan masyarakat ialah Undang-undang kecil (UUK) Taman MPKB 1980.

1. UUK 3(u) Menggunakan bahasa lucuh/sumbang atau berkelakuan tidak senonoh/sumbang.
2. UUK Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPKB)(Pindaan)2002.
3. UUK Kedai Gunting Rambut & Pendandan Rambut (MPKB)(Pindaan)2003.
4. UUK Penjaja(MPKB)(Pindaan)2003.
5. UUK Pengawalan & Penyeliaan Establisymen Makanan (MPKB)(Pindaan)2003.
6. UUK Rumah-Rumah Tumpangan (MPKB)(Pindaan)2003
7. UUK Kedai Dobi(MPKB)(Pindaan)2004
8. UUK Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian MPKB(Pindaan)2004
9. UUK Pasar MPKB (Pindaan)2004

Pindaan UUK 2 – 9 melibatkan:

- i. Tafsiran “aurat”

---

<sup>6</sup> Syukri Muhammad, *Undang-Undang Kecil MPKB-BRI Kota Bharu*, (Kota Bharu, Pusat Kajian Strategik, 2000), h. 54.

<sup>7</sup> Muhammad Na'im Daud, *Pentadbiran agama Islam di Kelantan: Kajian di akhir abad ke-19 sehingga awal abad ke-20 Masehi* (PhD dissertation) Jabatan Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2002), h. 43

Artinya seluruh tubuh badan wanita kecuali muka dan kedua-dua tangan

ii. Tafsiran “pakaian menutup aurat”

Pakaian wanita Islam yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua-dua tangan dan pakaian tersebut tidak ketat/sempit/sendat/nipis sehingga menampilkan bentuk tubuh badan. UUK 27A – Pemegang lesen hendaklah memastikan dirinya dan pekerja wanita Islam berpakaian menutup aurat semasa menjalankan tred dan jika bukan beragama Islam hendaklah berpakaian sopan.

Apa yang dapat ditafsirkan ialah MPKB-BRI tidak mempunyai bidangkuasa secara langsung untuk mengawal tatakelakuan masyarakat. Mereka hanya mempunyai bidangkuasa secara tidak langsung untuk mengawal moral masyarakat seperti mengenakan syarat-syarat lesen dan menggubal UUK berkaitan pelesenan perniagaan dan kawalan tempat-tempat awam seperti taman-taman.

**BAB IV**

**AURAT DALAM UNDANG-UNDANG KECIL MPKB-BRI DAN**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Batasan Aurat Terdapat Dalam Undang-Undang Mpkb-Bri**

Undang-undang berkaitan penutupan aurat dan pemakaian sopan majlis perbandaran Kota Bharu Kelantan:

1. Mengikut Undang-undang kecil(UUK) 27A dan Undang-undang kecil(UUK)Tred perniagaan dan perindustrian majlis perbandaran Kota Bharu Kelantan (MPKB) 1989.

“ Pemegang lesen hendaklah semasa menjalankan tred perniagaan atau perindustriannya jika ia wanita Islam memastikan dirinya dan semua pekerja wanitanya yang beragama Islam memakai pakaian menutup aurat dan jika pemegang lesen dan pekerja bukan Islam hendaklah memakai pakaian sopan”

2. Undang-undang kecil berkaitan mana-mana peniaga yang menjalankan perniagaan di Kelantan mesti mematuhi Undang-undang kecil tred, perniagaan dan perindustrian yaitu Undang-undang kecil (UUK2) perniagaan dan perindustrian majlis perbandaran Kota Bhari (MPKB) 1989:

“ Tafsir aurat- seluruh tubuh badan wanita kecuali muka dan kedua-dua tangan”

Tafsir pakaian menutup aurat “ pakaian wanita Islam yang menutupi seluruh badan kecuali muka dan kedua-dua tangan dan pakaian berkenaan tidak ketat atau sempit atau nipis sehingga menampakkan tubuh badan”

### **Ketentuan Undang-undang kecil MPKB-BRI Tentang Menutup Aurat.**

Undang-undang berkaitan penutupan aurat dan pemakaian sopan Majlis Perbandaran Kota Bharu, Kelantan.

1. Mengikut undang-undang kecil (UUK) 27A dan undang-undang kecil (UUK) Tred perniagaan dan perindustrian Majlis Perbandaran Kota Bharu, Kelantan (MPKB) 1989.” Pemegang Lesen hendaklah semasa berjalan berjalan tred perniagaan atau perindustriannya, jika ia wanita Islam memastikan dirinya dan semua pekerja wanitanya yang beragama Islam memakai pakaian menutup aurat, dan jika pemegang lesen dan pekerja-pekerja Islam hendaklah memakai pakaian sopan.

2. Undang-undang kecil berkaitan mana-mana peniaga yang menjalankan perniagaan di Kelantan mesti mematuhi undang-undang kecil tred perniagaan dan perindustrian iaitu undang-undang kecil (UUK 2) perniagaan dan perindustrian Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB).

Tafsir aurat iaitu seluruh tubuh badan wanita kecuali muka dan kedua-dua tangan.

Tafsir pakaian menutup aurat ialah pakaian wanita Islam yang menutup seluruh badan kecuali muka dan kedua-dua tangan dan pakaian berkenaan hendaklah tidak ketat atau sempit atau nipis sehingga menampakkan tubuh badan.<sup>1</sup>

### **1. Pembangunan Islam MPKB-BRI**

Islam adalah agama yang dibawa oleh Allah swt dengan sebuah agama yang murni, harmoni, syumul dan luhur. Ia digambarkan dengan keperibadian Rasulullah

---

<sup>1</sup> Jabatan Pembangunan Masyarakat MPKB-BRI , Buletin, Jun 2011, h. 1

saw yang memiliki akhlak yang mulia, bersifat sederhana dan suka melakukan kebaikan sesama makhluk. Ciri-ciri Rasulullah ini telah memberi keamanan dan rahmat seluruh alam. Sebagaimana firman Allah swt: "Tidaklah aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam" (al-Anbia': 107)

Pengertian aurat menurut bahasa adalah keaiban. Manakala menurut pandangan atau pengertian syarak ialah "Bahagian-bahagian tertentu yang ada pada badan manusia yang wajib ditutupi daripada pandangan orang yang diharamkan untuk melihatnya(bukan mahram)".

Perbedaan batas-batas aurat bagi seseorang ialah kerana hubungan keturunan dan kerana tali ikatan akibat perkawinan,seperti mertua,menantu,ipar duai dan sebagainya serta kerana penyusuan.<sup>2</sup>

Para alim ulama mazhab telahpun mempunyai pelbagai pendapat dan pandangan yang berbeda-beda bagi aurat ketika bersendirian,baik laki-laki maupun perempuan.

Bagi Imam Hanafi dan Imam Hambali, mereka berpendapat bahwa aurat ketika bersendirian adalah sebagaimana yang telah di larang terhadap seorang yang mukallaf(orang yang telah dituntut untuk beramal dengan suruhan dan meninggalkan segala bentuk larangan) daripada mendedahkan auratnya dihadapan orang yang diharamkan untuk melihatnya. Makanya dengan itu jualah di larang kepada kita supaya jangan mendedahkan aurat ketika bersendirian sekalipun. Kecuali apabila kita berada di dalam keadaan dharurat atau di dalam keadaan terpaksa membukanya.seperti mana yang kita semua sedia maklum tentang keadaan

---

<sup>2</sup> Mohamad Tajuddin Mohd Rasdi, Roslan Abdul Manan,*Konsep perbandaran Islam: suatu gagasan alternatif*. (Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), h.76



ketika kita sedang qodho hajat atau ketika sedang mandi. Maka apabila ketika sedang kita di dalam keadaan yang dharurat, bolehlah kita membukanya.

Manakala sementara bagi pendapat dan pandangan Imam Maliki dan Imam Shafi'i, aurat ketika kita sedang bersendirian adalah tidak diharamkan mendedahkan auratnya bahkan hanyalah makruh sahaja kecuali pada ketika kita sedang di dalam keadaan yang dharurat. Makanya apabila kita sedang di dalam keadaan dharurat, diharuskan kepada kita untuk membukanya.

Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam At-Turmuzy dinyatakan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telahpun bersabda yang maksudnya:<sup>3</sup>

يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي رُوحَةٍ : وَلَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ.

"Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lainnya, demikian jugalah wanita juga tidak boleh melihat aurat wanita yang lainnya juga, tidak boleh 2 orang lelaki berada (tidur) di dalam 1 selimut, demikian jugalah bagi wanita dilarang berbuat yang demikianinya".

Para alim ulama' mazhab mempunyai pelbagai pendapat<sup>4</sup> dan pandangan yang cukup berbeda mengenai had serta batas-batas aurat laki-laki. Sama ada melihat atau di lihat oleh orang lainnya.

---

<sup>3</sup> At-Tirmidzi, *as-Sunan*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1398 H. H.87

<sup>4</sup> Manshur bin Hasan al-Abdullah, *Syarah al-Arba'uun al-Uswah Min al-Ahaadiits al-Waaridah fii an-Niswah*, ( Daar al-Furqan, t.t), h.65

Bagi pendapat dan pandangan hukum Imam Hanafi dan Imam Hambali "laki-laki diwajibkan untuk menutupi auratnya di antara pusat hinggalah melebihi paras lutut daripada dilihat oleh laki-laki atau wanita yang bukan mahramnya kecuali kepada istrinya. Istri boleh(harus) melihat aurat suaminya, kecuali pada kemaluannya dan demikian jugalah bagi suami kepada istrinya. Ini adalah karena hukum suami istri melihat kemaluan masing-masing adalah makruh hukumnya.

Manakala bagi pendapat dan pandangan hukum menurut Imam Maliki<sup>5</sup> dan Imam Shafie; "Aurat kaum laki-laki ada 2 keadaan.

1. Auratnya dengan sesama laki-laki dan wanita yang mahram dengannya.
2. Auratnya dengan wanita yang bukan mahram dengannya.

Keadaannya dengan golongan yang pertama, iaitu dengan lelaki dan wanita yang mahram dengannya adalah di antara atas pusat hinggalah melebihi paras lutut sahaja. Manakala dengan golongan yang ke 2, iaitu sesama dengan wanita yang bukan mahram dengannya adalah seluruh badannya itu aurat bagi mereka. Artinya di sini adalah seluruh tubuhnya adalah dilarang untuk di lihat oleh kaum wanita yang bukan mahramnya. Kecuali bagi Imam Maliki yang membolehkan hujung-hujung aurat laki-laki boleh di lihat oleh wanita yang bukan mahramnya apabila aman daripada fitnah. Sementara Imam Syafie mengharamkan melihat dengan mata"(Rujuk kepada kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut 1403/1983), h.548.

<sup>6</sup> asy-Syafi'i, *ar-Risalah* (ed. Ahmad Syakir) (Kairo: Mathba'ah al-Halabi, t.t.).

Syarak telah menggariskan golongan yang dianggap sebagai mahram kepada seseorang wanita yaitu :

1. Suami
2. Ayah, termasuk datuk belah ibu dan bapa
3. Ayah mertua
4. Anak-anak laki-laki termasuk cucu sama ada dari anak laki-laki atau perempuan
5. Anak-anak suami dalam perkara ini Islam mengharuskan istri bergaul dengan anak suami karena wanita tersebut telah dianggap dan berperanan sebagai ibu kepada anak-anak suaminya.
6. Saudara lelaki kandung atau seibu atau sebapa
7. Anak saudara laki-laki karena mereka ini tidak boleh dinikahi selama-lamanya
8. Anak saudara dari saudara perempuan
9. Sesama wanita sama ada kaitan keturunan atau seagama
10. Hamba sahaya
11. Pelayan yang tidak ada nafsu syahwat
12. Anak-anak kecil yang belum mempunyai syahwat terhadap wanita. Walau pun begitu, bagi kanak-kanak yang telah mempunyai syahwat tetapi belum baligh, wanita dilarang menampakkan aurat terhadap mereka.

Jabatan Pembangunan Islam<sup>7</sup> merealisasikan falsafah pentadbiran bercorak Islam sejajar dengan slogan negeri Kelantan “Membangun Bersama Islam” ke dalam pentadbiran Majlis dan masyarakat perbandaran. Lebih berbangga karena Majlis

---

<sup>7</sup> Mohamad Tajuddin Mohd Rasdi, Roslan Abdul Manan, *Konsep perbandaran Islam: suatu gagasan alternatif*. (Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), h. 37

Perbandaran Kota Bharu Bandaraya Raya Islam merupakan satu-satunya yang menubuhkan Jabatan Pembangunan Islam yang antara lainnya berfungsi untuk :<sup>8</sup>

Melaksanakan sistem Pentadbiran Islam dalam pentadbiran dan pembangunan Majlis bagi melahirkan masyarakat penyayang dan cintakan Islam bersesuaian hasrat dan inspirasi kerajaan “Membangun Bersama Islam” Meningkatkan imej korporat Majlis yang Islamik dan dinamik sebagai satu jabatan yang memahami serta menghayati Islam.

## **2. Bidang Tugas Jabatan Pembangunan Islam**

- i. Mempastikan nilai-nilai Islam dihayati dalam pentadbiran MPKB<sup>9</sup>
- ii. Mengendalikan program-program kefahaman Islam di MPKB
- iii. Melaksanakan pembangunan Majlis menurut kehendak Islam
- iv. Bertanggungjawab memupuk dan mempertingkatkan kerjasama antara MPKB dengan masyarakat dalam kawasan MPKB
- v. Melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar
- vi. Membina sebuah masyarakat yang penyayang dan cintakan Islam

## **3. Strategi Jabatan**

- i. Mempastikan nilai-nilai Islam dihayati dalam pentadbiran MPKB
- ii. Mengendalikan program-program kefahaman Islam di MPKB
- iii. Melaksanakan pembangunan Majlis menurut kehendak Islam
- iv. Bertanggungjawab memupuk dan mempertingkatkan kerjasama antara MPKB dengan masyarakat dalam kawasan MPKB

---

<sup>8</sup> Jabatan Pembangunan Islam, Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam, *Buletin* jilid 3 17/8/2011

<sup>9</sup> Dasar-dasar Utama Kerajaan Negeri Kelantan, Susunan Pusat Kajian Strategi Dasar Wanita, Belia, Dasar Pelancongan, Dasar Pencegahan Sosial Juz III 2005 hal. 13

- v. Melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar
- vi. Membina sebuah masyarakat yang penyayang dan cintakan Islam<sup>10</sup>

#### **4. Aktiviti-Aktiviti Jabatan**

- i. Mengendalikan Operasi Maksiat Dan Hiburan Di Kawasan Majlis Perbandaran Kota Bharu.
- ii. Kawalan di pasar-pasar malam bagi memastikan semua peniaga pasar malam dan juga menunaikan sembahyang maghrib berjemaah.
- iii. Operasi nasihat dijalankan pada hari Sabtu yang meliputi kawasan: Taman Hijau dan Padang Merdeka, Laman Siti khadijah, sekitar Bandar Kota Bharu dan Sekitar Kawasan Kota Sri Mutiara
- iv. Menguatkuasakan peraturan menutup aurat di premis-premis perniagaan di kawasan Majlis
- v. Operasi Sepadu melibatkan MPKB, Jabatan Hal Ehwal Islam Kelantan, Polis Diraja Malaysia, Imigresin dan Agensi Dadah Kebangsaan. Operasi ini melibatkan tempat-tempat maksiat yang telah dikenalpasti.
- vi. MPKB menubuhkan pasukan sukarela iaitu Skuad Hisbah
- vii. Seminar Keluarga Bahagia. Diadakan kepada semua ibu bpa dan anak-anak. Selalu diadakan dikawasan taman perumahan.
- viii. Kursus Motivasi Islam di Pasaraya, Premis Perniagaan , Panjaja, Perkilangan dan Perhotelan (2 kali sebulan)

---

<sup>10</sup> *Ibid*

## **B. Pelaksanaannya dan Sangsi Bagi Yang Melanggar Ketentuan Tersebut.**

MPKB-BRI telah mengimplementasikan etika pemakaian yang menutup aurat melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (Lampiran 6) yang menjadi garis panduan khusus untuk orang ramai walaupun fokus undang-undang kecil tersebut berkuatkuasa kepada Undang-undang Kecil Trade Perniagaan MPKB-BRI 1986 (pindaan 2002) yang memperuntukkan peraturan tentang aurat.

Sejak MPKB-BRI memperjelaskan perkara tentang aurat kepada orang ramai khususnya golongan wanita muda beragama Islam melalui kempen Cakna Anak Muda dan hasilnya amat positif.<sup>11</sup> Mesejnya jelas iaitu untuk mengelak berlaku kejadian tidak diingini seperti rogol dan jenayah seksual yang kerap menjadi ancaman wanita. Wanita yang bekerja mengendalikan premis makanan dan bukan makanan juga tidak dibenarkan memakai kasut bertumit tinggi yang mengeluarkan bunyi. Arahan tersebut termaktub sebagaimana yang diperuntukkan mengikut Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu-Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) 1986.<sup>12</sup>

Isu berkaitan cara berpakaian di kalangan wanita Islam (Lampiran 1) timbul semula selepas Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB – BRI) menguatkuasakan Kod Etika Pakaian dengan mengenakan kompaun sebanyak RM500 ke atas pekerja wanita Islam di premis-premis perniagaan yang tidak berpakaian menutup aurat, manakala yang bukan Islam disyaratkan berpakaian

---

<sup>11</sup> Akhbar sinar Harian, 24 Jun 2011

<sup>12</sup> Rozaiman Che Kar (Pegawai Pembangunan MPKB Negeri Kelantan) *Wawancara*, Kota Bharu, 4 Januari 2012

sopan. Peraturan tersebut mula dikuatkuasakan memandangkan nasihat yang diberikan oleh MPKB sejak 10 tahun yang lalu tidak diendahkan.<sup>13</sup>

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan, Haji Takiyuddin Hassan<sup>14</sup>, mengatakan bahwa setiap wanita Islam hendaklah menutup aurat kecuali apa yang biasa ternampak iaitu muka dan tapak tangan dan laki-laki Islam pula diantara pusat dan lutut. Walaubagaimanapun wanita bukan Islam dikehendaki berpakaian sopan. Sehingga kini, seramai lebih kurang 160 wanita Islam yang tidak memakai tudung ketika bekerja dikenakan kompaun oleh Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) sejak Januari 2006 lalu.

Tindakan MPKB itu telah mengundang pelbagai reaksi di kalangan barisan pemimpin negara. Ini termasuklah daripada Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak yang menyatakan: "*We are already facing problems in terms of interpretation on what constitutes indecent dressing. This (move) will only create uneasiness and unhappiness among certain quarters or groups. They (the council) should not get overly excited to act based on their own interpretation*". [NSTP]

(Kita sedang menghadapi masalah dalam menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan pakaian bersopan. Pendekatan ini hanya menyebabkan keresahan dan tidakpuas hati pihak dan kelompok lain. Mereka tidak sepatutnya bersikap gopoh dan bertindak mengikut pentafsiran sendiri).<sup>15</sup>

Dr. Rozaidah dari kelab penyokong BN yang juga merupakan MP bahagian Ampang menyatakan: *That it was a person's right to dress as she pleased and no one*

---

<sup>13</sup> Akhbar harakah daily 25 Disember 2006

<sup>14</sup> Takiyuddin Hassan (EXCO Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Kelantan) Wawancara, Kota Bharu, 15 Januari 2012

<sup>15</sup> Akhbar Utusan Malaysia, 9 September 2006

*had the right to dictate the person's way of dressing. By imposing fines, it only shows the shallow-mindedness of the council [NSTP]* ( Seseorang itu berhak menentukan bagaimanakah cara dia hendak berpakaian dan orang lain tidak berhak mencampuri urusan pakaian seseorang itu. Dengan mengenakan denda, ia hanya membuktikan pemikiran sempit Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)).<sup>16</sup>

Menteri Besar Kelantan pula memberi justifikasi terhadap pendekatan MPKB memandangkan masalah rogol dan keruntuhan akhlak semakin banyak dan berkembang, bukannya semakin berkurang. Karena itu, Islam awal-awal lagi menetapkan peraturan berpakaian yang kita panggil menutup aurat sebagai langkah mencegah perkara tidak bermoral dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Shahrizat Abdul Jalil pula mendakwa peraturan tersebut telah menyebabkan golongan wanita tidak dapat menentukan pilihan mereka dalam berpakaian, sebaliknya ditentukan oleh Kerajaan Negeri.

Pelaksanaan undang-undang kecil mengenai aurat ini juga banyak mendapat persetujuan ramai, malah menyokong undang-undang tersebut karena dapat memperlihatkan peranan MPKB-BRI dalam menurut kehendak syariat Islam terutamanya dalam etika pakaian yang sopan.<sup>18</sup>

Penguatkuasaan larangan mendedah aurat itu dikenakan kepada golongan peniaga yang menjalankan aktiviti perniagaan mereka di bandar ini tanpa mengira waktu. Operasi itu diadakan selepas mendapati ramai peniaga dan pekerja wanita

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Akhbar Harakah, 2010

<sup>18</sup> Marina Mat Dahan (Pegawai Ekonomi Negeri Kelantan) *Wawancara*, Kota Bharu, 4 Januari 2012



beragama Islam tidak menutup aurat walaupun pekeliling bertajuk Arahan Mematuhi Etika Berpakaian telah dikeluarkan sebelum ini. Mereka yang dikenakan tindakan itu didapati tidak memakai tudung kepala, memakai kemeja-T berlengan pendek dan ketat serta berseluar panjang ketat.<sup>19</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam terhadap undang-undang kecil Majlis Perbandaran Kota Bharu-BRI tentang aurat.

#### i. Mematuhi Undang-undang Negara

Mematuhi undang-undang Negara termasuk dalam pengertian mentaati pemerintah. Allah berfirman (maksudnya);<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ( )

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada “Ulil-Amri” dari kalangan kamu” (an-Nisa’, ayat 59).

*Ulil-Amri* dalam ayat di atas bermaksud orang-orang yang bertanggungjawab mengurus urusan kaum muslimin. Mereka merangkumi ulamak dan pemerintah. Ulamak bertanggungjawab tentang urusan agama dan pemerintah (umara’) pula bertanggungjawab tentang urusan duniawi dan masalah hidup rakyat. (Tafsir Ibnu Kathir)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muizzudin Ahmad (Pegawai Penyelaras PKINK Negeri Kelantan) Wawancara, Kota Bharu, 4 Januari 2012

<sup>20</sup> *Ibid*, Sheikh Abdullah Basmeikh, h.200

<sup>21</sup> *Tafsir al-Quran an-Adziem*, Imam Ibnu Kathir, surah an-Nisa’, ayat 59. Hal 32



kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya” (Surah an-Nisa’, hujung ayat 59).

Dari segi sikap rakyat pula, mereka wajib<sup>23</sup> mentaati pemerintah selama pemerintah berpegang-teguh dengan agama Allah dan tidak menyuruh rakyatnya melakukan dosa, maksiat dan munkar. Sabda Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam-;<sup>24</sup>

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا

Artinya:“Wajib ke atas seorang muslim untuk dengar dan taat (kepada pemerintah) dalam perkara yang ia suka atau ia benci selama ia tidak disuruh melakukan maksiat. Namun bila dia disuruh melakukan maksiat, tidak harus lagi ia dengar dan taat”. (HR Abu Daud dari Abdullah bin Umar).

Kesimpulannya, selama undang-undang yang digubal tidak menyalahi al-Quran dan as-Sunnah, wajiblah kita mematuhi sama ada undang-undang itu berkait dengan peraturan jalan raya, percukaian, keselamatan, kekeluargaan, kontrak dan sebagainya. Perkara yang wajib jika dilaksanakan akan diberi pahala dan jika dilanggari akan berdosa.

Hukum berpakaian yang telah ditentukan oleh Islam bukanlah mencegah seseorang wanita itu untuk memakai pakaian yang disukainya. Perundangan Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan fitrah mereka, tidak sama sekali menyekat semua aktiviti. Hukum berpakaian di dalam Islam berkait rapat dengan sistem pergaulan di antara laki-laki dan wanita. Maka apabila seorang laki-laki mukmin berinteraksi dengan wanita

---

<sup>23</sup> Jaafar Salleh (2006). *Batas-Batas Aurat Dan Pergaulan Serta Hukum Persolekan Dalam Islam*. Johor Darul Ta'zim: Pustaka Azhar. H.43

<sup>24</sup> Abu Daud, *as-Sunan*, Dar al-Hadits, Syria.

muslim atau bukan, mereka hanya berhak memandang bahagian-bahagian wanita yang dibenarkan, iaitu muka dan dua tapak tangan.

Tidak ada kebebasan mutlak di dalam Islam. Seorang muslim wajib untuk terikat dengan hukum syara' yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Ini termasuklah di dalam bab hukum tentang pemakaian. Firman Allah SWT :<sup>25</sup>

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا

( : 31).

Artinya: “(Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung).

Kefahaman ayat-ayat di atas telah pun dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat. Ia kemudiannya diwarisi pula oleh para pengikut sahabat (tabi'in). Dan sejak dari dahulu lagi, hukum berkaitan berpakaian tidak pernah berubah. Seluruh dunia Islam telah pun maklum bahwa pakaian bagi wanita muslim adalah dengan berjilbab dan menutup seluruh kepala sehingga ke bahagian

<sup>25</sup> Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Shahir bi tafsir al-Manar Jilid II, 1983. Hal.112

dada (khimar) kecuali muka dan tapak tangan. Semua ini telah dilaksanakan oleh kaum muslimin sejak ratusan tahun dahulu. Maka dengan itu, sesiapa pun tidak berhak untuk mempertikaikan atau menafsirkan semula hukum cara berpakaian yang wajib diikuti oleh laki-laki mahupun wanita muslim.<sup>26</sup>

Sebahagian daripada bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa Islam sebenarnya telah meletakkan garis panduan yang jelas di dalam berpakaian, tatacara berinteraksi dan peranan laki-laki dan wanita di dalam kehidupan. Dengan itu akan terwujud interaksi antara laki-laki dan wanita dalam suasana yang harmoni.

Bagi mereka yang memahami Islam dari sumber yang sahih, ia tidak pelik sama sekali malah tepat sekali terutamanya di waktu wanita keluar bekerja.

Sabda Nabi s.a.w :<sup>27</sup>

غريبا وسيعود غريبا

Artinya : Sesungguhnya Islam dahulu datang dalam keadaan asing, dan ia akan kembali semula dalam keadaan yang dilihat asing" (Riwayat Muslim)

Al-Qadhi 'Iyadh mengulas bahawa di waktu Islam muncul dahulu, ia hanya diamalkan oleh sebilangan kecil pengikut, justeru ajaran-ajarannya dilihat begitu pelik dan asing dari kebiasaan masyarakat Jahiliyyah, kemudian Islam tersebar luas di seluruh dunia. Sesudah itu, semakin ramai yang akan culas dari ajaran Islam sehingga Islam tidak diamalkan kecuali oleh sedikit manusia sahaja. Tatkala itulah kumpulan yang ingin dan telah mengamalkan Islam akan dilihat begitu pelik oleh si Jahil, munafiq dan kafir yang merupakan majoriti.

---

<sup>26</sup> Rahmat Ismail *Sosial Satu Peradaban Dalam Kehidupan Manusia*. (Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd. 1997).

<sup>27</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, Abu al-Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1983), 5 vol.

Setiap satu melengkapi antara satu sama lain. Mana yang terbaik di sisi Allah?, ia bergantung kepada dalaman, usaha bersungguh dan keikhlasan si pendakwah.

Allah swt berfirman :<sup>28</sup>

يَعْمَلْ شَاكِلَتِهِ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Artinya : Katakanlah: ""Tiap-tiap orang berbuat amalan menurut keadaannya masing-masing"". Maka tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya" ( Al-Isra : 84 )

Ibn Abbas menyatakan erti "syakilatihi" dalam ayat ertinya " sudut masing-masing", manakala sebahagian lain mengatakan berdasarkan niat masing-masing( At-Tabari, 15/154 ; Al-Qurtubi, 10/322)<sup>29</sup>

Buat pihak yang suka dan berhasrat untuk mengutuk kerja dan usaha baik orang lain, sedarilah anda sebenarnya sedang melakukan dosa dan menjauhkan orang dari Islam dan hidayah Allah.

Disebutkan dalam sebuah hadis <sup>30</sup>:-

روى شينا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط

Artinya :

"Janganlah kamu mencela apa jua perkara kebaikan (yang dilakukan) , walaupun hanya sekadar seseorang bertemu saudaranya dengan wajah yang senyum dan riang.." ( Riwayat Ahmad , dari hadis Jabir , no 19717 )

Justeru, apa jua kebaikan yang mampu diusahakan oleh seseorang, kita ditegah untuk memperlecehkannya. Yang penting juga adalah setiap kita bukan Malaikat yang mengetahui setiap gerak geri, niat dan usaha yang dilakukan oleh

<sup>28</sup> Ibid,h.701

<sup>29</sup> Al-tabariy, Abu-Ja`far Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Khalid (died in AH 310). *Jami` al-Bayan `An Ta'wil ay al-Quran (Tafsir al-tabariy)*. 30 volumes. Beirut: Dar al-Fikr Publishers, AH 1405.

<sup>30</sup> Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad*. (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1993)h.136

orang lain untuk Islam. Oleh demikian, tidak adil sama sekali dengan ringan mulut kita menuding jari mendakwa seseorang itu telah tidak berjuang untuk Islam karena sibuk dengan bisnesnya, motivasinya, syarikatnya, sekolahnya, kerjayanya dan lain-lain.

Kita sebenarnya tidak tahu secara tepat akan usaha dakwah yang dilakukan oleh orang lain, disebabkan sebahagian usaha untuk Islam mungkin dilaksanakan secara kelompok kecil, dan sebahagian yang lain pula tiada publisitinya. Akhirnya tahanlah diri dari mudah bersangka buruk dan perhatikan tugas dan keikhlasan niat kita sendiri dalam berjuang untuk kebaikan Islam, dan kurangkan 'menyibuk' dengan kutukan kepada individu lain.

## ii. Peraturan dan Undang-Undang Yang dibuat Kerajaan

Sesungguhnya Islam menyeru umatnya agar menjadi contoh terbaik bagi melayakkan mereka menjadi qudwah kepada umat lain. Perkara ini telah berlaku kepada generasi pertama umat ini. Allah swt telah berfirman di dalam al-Quran:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۚ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ ۚ بِالنَّاسِ لِرَأْوْفٍ رَّحِيمٍ:

Artinya: Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhamad) satu umat pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). al-Baqarah:143<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid, h. 55-56

Jelas antara peranan umat Islam ialah menerangkan kepada umat manusia mengenai perkara-perkara benar dan perkara-perkara batil dalam kehidupan. Dalam perkataan lain umat Islam perlu menjadi contoh kepada umat lain. Jadi umat Islam wajar mengamalkan terlebih dahulu sesuatu kebenaran dan meninggalkan sesuatu kebatilan sebelum menerangkan perkara-perkara tersebut kepada umat lain. Jika tidak, umat lain akan menolak mentah-mentah penerangan daripada umat Islam yang bercakap tak serupa bikin.

Pada hari ini terdapat segelintir umat Islam yang tidak mengikut peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Bagaimana umat Islam boleh menjadi umat yang terbaik jika peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak kerajaan tidak dipatuhi. Ia memberi imej yang buruk mengenai sikap umat Islam yang suka melanggar peraturan dan undang-undang. Alasan yang diberi ialah kerajaan yang memerintah adalah dari golongan yang zalim atau kerajaan yang ada adalah kerajaan yang fasiq dan sebagainya. Maka segala peraturan yang lahir dari kerajaan yang fasiq tidak wajib diikuti. Benarkah alasan tersebut?

Bagi menjawab persoalan ini,<sup>32</sup> saya ingin berkongsi pandangan Syeikh Muhamad Ahmad Ar-Rasyid mengenai perkara di atas. Syeikh Ar-Rasyid telah memberikan pandangan beliau mengenai perkara di atas di dalam bukunya yang bertajuk “Asas-asas berfatwa dan berijtihad dalam fiqh dakwah”. Beliau menulis perkara ini di bawah tajuk; “Beberapa contoh daripada fiqh klasik dalam merai masalah dan perkara-perkara dharuri.”

---

<sup>32</sup> Muhamad Ahmad Ar-Rasyid, *Asas-asas berfatwa dan berijtihad dalam fiqh dakwah* (Kuala Lumpur, Penerbit: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2002), h. 65



Di bawah tajuk ini beliau telah menyebut lima belas perkara daripada fiqh klasik contoh-contoh perbincangan ulama terdahulu dalam merai masalah dan perkara-perkara dharuri. Beliau telah membincang permasalahan di atas dalam contoh yang kesembilan di bawah tajuk: Mematuhi apa yang menepati syarak atau masalah dari tindakan-tindakan pemimpin yang fasiq. Beliau memulakan perbincangan dengan menukilkan pandangan ulama terkenal mazhab Shafi'e, I'z bin Salam.

I'z bin Salam telah berkata:<sup>33</sup>

*Pemerintahan orang fasiq adalah mafsadah (kerosakan) kerana dominannya perkara khianat dalam pemerintahannya. Akan tetapi kami membenarkannya sebagai hak pemimpin atau pemerintah yang fasiq, jika kerana menolaknya akan menyebabkan luputnya kepentingan dan kebajikan orang ramai. Maka kami tidak membatalkan tindakannya dalam perkara masalah (kebajikan) walaupun wujud tindakannya yang batil. Adalah tidak wajar menolak perkara yang hak kerana wujud perkara batil pada tempat lain. Maka aku berpandangan: Kita membenarkan (mengira sebagai sah) tindakan pemimpin tersebut dalam urusan yang menepati kebenaran walaupun wujud pertikaian pemerintahan mereka. Semua ini adalah demi menjaga kepentingan rakyat... (Qawaid al-Ahkam dengan adaptasi).*

Berdasar pandangan I'z bin Salam di atas, maka Syeikh Muhamad Ahmad Ar-Rasyid berkata:

*“Oleh sebab itu, menjadi tanggungjawab dai'e mematuhi peraturan-peraturan umum kerajaan di negara-negara sekular atau negara-negara kafir yang mereka diami. Berdasar alasan ini, maka peraturan-peraturan jalan raya, sistem pengurusan pasar, pengurusan sitem kesihatan, sistem pengajian, penjagaan alam sekitar, pembinaan, pertanian, pengilangan dan sebagainya wajib diikuti.*

---

<sup>33</sup> Mustofa Al-Khin, Mustofa al Bugho & Ali al-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.2004. hal 603

Perbedaan politik dengan pemerintah yang zalim tidak menjadi halangan untuk mematuhi pandangannya dalam perkara-perkara di atas yang berkait dengan penjagaan kepentingan orang ramai. Syeikh Ahmad Muhamad Syakir menyokong pandangan ini ketika menghurai kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Syeikh Ar-Rasyid telah membawa pandangan ulama lain bagi menguatkan lagi pandangan di atas. Untuk pembacaan lanjut, sila rujuk buku beliau dalam tajuk yang dinyatakan di atas.<sup>34</sup>

Dari huraian ringkas di atas, maka jelaslah bagi para dai'e bahawa mereka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang memberi kebaikan kepada rakyat walaupun ianya datang dari pemerintah yang zalim atau fasiq. Sebagai contoh, peraturan jalan raya dikuatkuasakan adalah untuk menjaga keselamatan orang ramai. Para dai'e perlu mematuhinya. Jika dia melanggar undang-undang tersebut lalu ditangkap dan dia cuba melepaskan diri dengan cara memberi sejumlah wang, maka pemberian wang tersebut adalah pemberian yang dilarang.

## E. Hasil Penelitian

**Tabel 1: Gender Responden**

No	Gender	f(%)
1	Laki-Laki	15(30)
2	Perempuan	35(70)

Dalam tabel 1, Seramai 35 (70%) responden perempuan dan 15 (30%) orang responden laki-laki yang terlibat dalam penelitian ini.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

**Tabel 2: Persepsi Orang Ramai Terhadap Undang-Undang Kecil MPKB-BRI**

Bil	Item	Skala <i>f (%)</i>				
		STS	TS	TP	S	SS
1	Pelaksanaan undang-undang mengenai aurat adalah jelas	-	-	-	7(14)	43(86)
2	Pelaksanaan undang-undang aurat mengikut hukum syarak	-	-	-	-	50(100)
3	Pelaksanaan undang-undang aurat berkesan	-	4(8)	20(40)	20(40)	6(12)
4	Peraturan mengenai aurat jelas kepada umum	-	-	12(24)	33(66)	5(10)
5	Kempen berpakaian yang beretika begitu tegas	-	-	10(20)	30(60)	10(20)
6	Kempen berpakaian beretika bagus dilaksanakan	-	-	10(20)	30(60)	10(20)
7	Pelaksanaan undang-undang kecil menutup aurat oleh pemerintah wajib dipatuhi	-	-	25(50)	13(26)	12(24)
8	Pelaksanaan undang kecil diketahui orang ramai		-		40(80)	10(20)
9	Pelaksanaan undang kecil meluas di papan tanda	-	-	5(10)	12(24)	33(66)
10	Pelaksanaan undang kecil aurat dan berpakaian diikuti orang ramai	-	10(20)	12(24)	18(36)	10(20)

Tabel 2 di atas menunjukkan keseluruhan bagi konstruk persepsi terhadap pelaksanaan undang-undang kecil berkaitan aurat dan pakaian yang sopan oleh MPKB-BRI.

Bagi soalan 1, Pelaksanaan undang-undang mengenai aurat adalah jelas menunjukkan 7(14%) setuju dan 43(86%) sangat setuju.

Bagi soalan 2, Pelaksanaan undang-undang aurat mengikut hukum syarak 50(100%) sangat setuju.

Bagi soalan 3, Pelaksanaan undang-undang aurat berkesan sebanyak 4(8%) tidak setuju, 20(40%) bagi tidak pasti dan setuju dan 6(12%) bagi sangat setuju.

Bagi soal 4, Peraturan mengenai aurat jelas kepada umum 12(24%) tidak pasti, 33(66%) setuju dan 5(10%) sangat setuju.

Bagi soal 5, Kempen berpakaian yang beretika begitu tegas 10(20%) tidak pasti, 30(60%) setuju dan 10(20%) sangat setuju.

Bagi soal 6, Kempen berpakaian beretika bagus dilaksanakan 10(20%) tidak pasti, 30(60%) setuju dan 10(20%) sangat setuju.

Bagi soal 7, Pelaksanaan undang kecil menutup aurat oleh pemerintah wajib dipatuhi 25(50%) tidak pasti, 13(26%) setuju dan 12(24%) sangat setuju.

Bagi soal 8, Pelaksanaan undang kecil diketahui orang ramai 40(80%) setuju dan 10(20%) sangat setuju.

Bagi soal 9, Pelaksanaan undang kecil meluas di papan tanda tidak pasti, 5(10%) tidak pasti, 12(24%) setuju dan 33(66%) sangat setuju.

Bagi soal 10, Pelaksanaan undang kecil aurat dan berpakaian diikuti orang ramai 10(20) tidak setuju, 12(24) tidak pasti, 18(36) setuju dan 10(20) sangat setuju.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kejayaan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) melaksanakan peraturan Islam di kawasan pentadbirannya menarik minat pelbagai pihak khususnya agensi kerajaan dan penyelidik dari institusi pengajian tinggi. Implementasi undang-undang kecil aurat juga telah lama dilakukan, tetapi tidak disadari oleh orang ramai kerana tumpuannya hanya kepada penguatkuasaan larangan mendedah aurat hanya dikenakan kepada golongan peniaga yang menjalankan perniagaan di kawasan MPKB BRI tanpa mengira masa bukannya kepada pengunjung.
2. Merujuk kepada hasil kajian yang telah dijalankan mendapati semua responden menyatakan bahawa undang-undang kecil menutup aurat dengan mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Islam telah diimplementasikan oleh MPKB-BRI. Ramai setuju dan mengatakan bahawa undang-undang kecil ini dilaksanakan begitu berkesan, mendapat perhatian ramai orang seperti yang diurai dalam bab 4.
3. Kejayaan Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) melaksanakan peraturan Islam di kawasan pentadbirannya menarik minat pelbagai pihak khususnya agensi kerajaan dan penyelidik dari institusi pengajian tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan untuk mempertahankan kesucian islam:

### **1. Memperkukuh Aqidah**

Aqidah, atau keimanan, adalah asas untuk menentukan sama ada seorang itu Islam atau tidak. Jika ia beriman maka barulah diterima sebagai Islam, kerana iman bererti membenarkan atau bertasdiq dengan hati dan berikrar dengan lisan dan beramal anggota zahir dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wataala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Untuk memenuhi tuntutan iman, maka perlu ada ketiga-tiga perkara ini, iaitu mengakui di dalam hati bahwa Islam itu benar, kalimah syahadah adalah intipatinya, menyatakan dengan lidahnya bahawa Islam itu agama yang benar, menyebut dan mengikrarkan kalimah syahadah adalah kuncinya, serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama Islam itu. Kalau ketiga-tiga perkara tidak ada, maka tidaklah sempurna keimanan seseorang itu.

### **2. Menghayati Syariah**

Syariah ialah setiap hukum yang diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wataala ke atas hambanya agar mereka beriman kepadanya boleh membawa kebahagiaan di dunia dan diakhirat. Hukum-hukum ini dinamakan syariah kerana kedudukannya yang lurus, sistemnya yang benar dan tidak menyimpang daripada tujuannya sama seperti jalan yang tidak menyimpang daripada tujuannya, lurus dan betul. Berdasarkan pengertian ini ia bolehlah disamakan

dengan saluran air yang menjadi sumber kerana air pun menjadi punca kehidupan bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan kenyataan tersebut adalah jelas bahwa syariah ialah hukum-hukum yang diturunkan dan diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wataala, kepada hamba-hambanya yang bersifat adil, hak dan syumul, sistemnya adalah unggul dan berwibawa, perjalanannya lurus dan tidak menyimpang daripada tujuan asalnya. Berpegang dan menghayatinya membolehkan kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum-hukum yang diperundangkan oleh Islam adalah luas dan menyeluruh termasuklah yang berhubung dengan muamalah dalam ertikata yang luas, ibadah, akidah dan akhlak.